



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

2024



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KAB. BERAU**  
JL. BUJANGGA NO. 1 TANJUNG REDEB



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan bahwa seluruh Instansi Pemerintah WAJIB menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai gambaran pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKJ-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menyadari akan hal itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau, disadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya harus transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas. Hal tersebut yang mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pada tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau telah berusaha mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tujuan/Sasaran Strategis dengan baik. Indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan/memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, hal ini akan dijadikan evaluasi untuk perbaikan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau pada tahun 2023.



Dengan adanya LKJ-IP ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau untuk mendukung terciptanya "*Good Governance*" atau pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKJ-IP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya LKJ-IP ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholders untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Sejak tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau telah melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan telah disesuaikan dalam Dokumen RENJA 2024.

Akhirnya, kami dari tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJ-IP ini.

Tanjung Redeb, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan Kabupaten Berau



**Supaldi, S.Pt**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 199703 1 004



## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	2
D. Sumber Daya Manusia .....	2
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis .....	12
1. Tujuan dan Sasaran .....	13
2. Program dan Kegiatan .....	15
B. Indikator Kinerja Utama .....	21
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	23
D. Perjanjian Kinerja (PK) .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>33</b>
A. Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya .....	33
B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	35
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	37
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	37
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	38



3.	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	39
4.	Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	39
5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	45
6.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	46
	<b>Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Pertanian</b> .....	46
	Program dengan Capaian Indikator Kinerja 100% (3 Program) .....	50
	Program dengan Capaian Indikator Kinerja <100% (2 Program) .....	61
	<b>Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Produksi</b> .....	72
	Program dengan Capaian Indikator Kinerja 100% (2 Program) .....	76
	Program dengan Capaian Indikator Kinerja <100% (2 Program) .....	83
D.	Realisasi Anggaran .....	89
1.	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....	90
2.	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan .....	90
	<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	99
	<b>LAMPIRAN</b> .....	101



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
1 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian	3
2 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan	3
3 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jabatan Struktural	4
4 Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis	5
5 Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan	9
6 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau per Kecamatan	9
7 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Fungsional (Medik dan Paramedik Veteriner) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	10
8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	14
9 Program dan Kegiatan Dinas Tanaman, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	16
10 Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	22
11 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	23
12 Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	32
13 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Berau Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	34



14	Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	35
15	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	37
16	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir	38
17	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau	39
18	Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Tahun 2024	39
19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	45
20	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran I Tahun 2024	46
21	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	73
22	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	90
23	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	90



# **Bab I** **Pendahuluan**

- 1. Latar Belakang***
- 2. Tugas Pokok dan Fungsi***
- 3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah***
- 4. Sumber Daya Manusia***
- 5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)***



## A. Latar Belakang

**D**inas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang pertanian sektor pertanian dan peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah Berau.

Dasar pembentukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

### - Tugas

**M**enurut Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2023 Dinas mempunyai tugas yaitu "Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah di Bidang Pertanian pada Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan".

### - Fungsi

**D**inas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan prasarana pertanian;
4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak,
5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian,
6. Pembinaan produksi di bidang pertanian,



7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan,
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian,
9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian,
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian,
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian,
13. Pelaksanaan administrasi dinas,
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**P**enjabaran struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Peternakan
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

### **D. Sumber Daya Manusia**

**D**inas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian**

No	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian				Jumlah
		a	b	c	d	Non PNS	PPPK	CPNS	PNS	
1	Golongan I	0	0	3	0	0	0	0	3	3
2	Golongan II	3	8	2	6	0	0	0	19	19
3	Golongan III	18	18	4	26	0	0	0	66	66
4	Golongan IV	7	0	1	0	0	0	0	8	8
5	PPPK	0	0	0	0	0	27	0	0	27
6	Non PNS	0	0	0	0	29	0	0	0	29
<b>Total</b>						<b>29</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>152</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 152 orang SDM yang terdiri dari 8 (delapan) orang aparatur golongan IV, 66 (enam puluh enam) orang aparatur golongan III, 19 (sembilan belas) orang aparatur golongan II, 27 (dua puluh tujuh) orang PPPK, dan 3 (tiga) orang aparatur golongan I, serta non PNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	SD	1	0	0	0	1	0	2
2	SLTP	2	0	0	0	1	1	4
3	SLTA	25	7	2	2	11	1	48
4	Diploma	6	2	0	0	3	1	12
5	S I/ D.IV	28	15	15	9	4	3	74
6	S 2/ Profesi	7	2	1	0	1	1	12
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>152</b>

Keterangan :  
Lk : Laki-Laki  
Pr : Perempuan



Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur yang berstatus PNS, PPPK dan Non PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan bahwa didominasi oleh tingkat pendidikan SI/D.IV dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) orang atau 48,68%, selanjutnya SLTA jumlah 48 (empat puluh delapan) orang atau 31,58%, S2/Profesi 12 (dua belas) orang, Diploma 12 (dua belas) orang, dan terakhir SLTP 4 (empat) orang, SD 2 (dua) orang atau hanya 1,31%.

Sedangkan sumber daya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau berdasarkan tingkat eselon (jabatan struktural) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jumlah Eselon		
		Ideal	Terisi	Kosong
1	Eselon II. B	1	1	0
2	Eselon III. A	1	1	0
3	Eselon III. B	4	4	0
4	Eselon IV. A	10	9	1
5	Eselon IV. B	10	10	0
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal terkait dengan jumlah jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Eselon II.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Dinas, jabatan tersebut telah terisi definitif.
2. Eselon III.A adalah eselon untuk jabatan Sekretaris Dinas, dan jabatan tersebut terisi definitif.
3. Eselon III.B adalah eselon untuk jabatan Kepala Bidang pada Dinas, sebanyak 4 (empat) dan telah terisi definitif.
4. Eselon IV.A adalah eselon untuk jabatan Kepala UPT dan 1 (satu) kosong yaitu Kepala UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.



5. Eselon IV.B adalah eselon untuk jabatan Kepala UPT (tipe B) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan telah terisi definitif.

Sumber daya aparatur pada UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis**

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. RPH</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	0	0	0	5	0	5
4	Diploma	1	0	0	0	0	0	1
5	S I/ D.IV	0	0	0	0	1	0	1
6	S 2/ Profesi	1	0	0	0	0	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. BBPH</b>								
1	SD	1	0	0	0	0	0	1
2	SLTP	1	0	0	0	0	0	1
3	SLTA	4	0	0	0	3	0	7
4	Diploma	0	0	0	0	1	1	2
5	S I/ D.IV	1	0	0	0	1	0	2
6	S 2/ Profesi	1	0	0	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>



No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>								
1	SD	0	0	0	0	1	0	1
2	SLTP	0	0	0	0		0	0
3	SLTA	0	0	0	0	2	0	2
4	Diploma	0	0	0	0	0	0	0
5	S I/ D.IV	1	0	0	0	0	0	1
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. BPPP</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	6	5	2	2	0	0	15
4	Diploma	2	2	1	0	0	0	5
5	S I/ D.IV	6	9	8	5	0	0	28
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Sambaliung</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	1	0	0	0	0	0	1
4	Diploma	1	0	0	0	0	1	2
5	S I/ D.IV	1	0	0	0	0	0	1
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>



No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Biatan</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	1	0	0	0	0	0	1
4	Diploma	0	0	0	0	1	0	1
5	S I/ D.IV	2	0	0	0	0	0	4
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Talisayan</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	0
4	Diploma	0	0	0	0	1	0	1
5	S I/ D.IV	0	0	0	0	0	0	0
6	S 2/ Profesi	0	0	1	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Batu Putih</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	1	0	0	0	0	1
4	Diploma	0	0	0	0	1	0	1
5	S I/ D.IV	2	0	0	0	0	0	2
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0



No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Gunung Tabur</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	0
4	Diploma	0	0	0	0	0	0	0
5	S I/ D.IV	2	0	0	0	1	0	3
6	S 2/ Profesi	1	0	0	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>UPT. Puskesmas Kec. Segah</b>								
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	3	0	0	0	0	0	3
4	Diploma	1	0	0	0	0	0	1
5	S I/ D.IV	1	0	0	0	0	0	1
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis dilapangan yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau membutuhkan sumber daya manusia teknis/fungsional untuk kegiatan Pertanian yaitu PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Rincian tenaga PPL (PNS dan PPPK) yang tersedia saat ini sebagai berikut :



**Tabel 5**  
**Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	CPNS/PNS		PPPK		Total
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0
3	SLTA	6	5	2	2	15
4	Diploma	2	2	0	0	4
5	S I/ D.IV	4	9	8	5	26
6	S 2/ Profesi	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>45</b>

Jumlah keseluruhan jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau sebanyak 45 orang yang bertugas pada 12 Kecamatan wilayah binaan. Saat ini jumlah PPL yang tersedia masih belum ideal dikarenakan jumlah kelompok tani, Jumlah gabungan kelompok tani dan Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang perlu dibina sebanyak 847 dan minimal satu PPL bertugas untuk satu kampung, sehingga kondisi ini menyebabkan pendampingan pada kelompok tani tidak bisa maksimal. Rincian Kebutuhan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) per Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kebutuhan Sumber Daya Manusia Fungsional (PPL) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah			
		CPNS/ PNS/ PPPK/ THL	CPNS/ PNS	PPPK	CPNS/ PNS/ PPPK/ THL
		Ideal	Terisi		Kosong
1	Kelay	6	2	0	4
2	Segah	8	5	2	1
3	Teluk Bayur	5	3	0	2
4	Gunung Tabur	11	5	1	5
5	P. Derawan	3	1	1	1
6	Tanjung Redeb	5	3	0	2
7	Sambaliung	12	4	5	3
8	Tabalar	6	2	2	2
9	Biatan	8	1	1	6



No	Kecamatan	Jumlah			
		CPNS/ PNS/ PPPK/ THL	CPNS/ PNS	PPPK	CPNS/ PNS/ PPPK/ THL
		Ideal	Terisi		Kosong
10	Talisayan	9	1	3	5
11	Batu Putih	3	1	2	0
12	Biduk-Biduk	2	0	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>33</b>

Sumber daya manusia teknis/fungsional bidang Peternakan diantaranya adalah tenaga medik dan paramedik, dengan rincian yang tersedia saat ini sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Kebutuhan Sumber Daya Manusia Fungsional**  
**(Medik dan Paramedik Veteriner)**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

No	Lokasi	Jumlah Medik Veteriner			Jumlah Paramedik Veteriner		
		Ideal	Terisi	Kosong	Ideal	Terisi	Kosong
	<b>Puskesmas :</b>						
1	Kec. Sambaliung	2	0	2	3	2	1
2	Kec. Biatan	2	0	2	3	2	1
3	Kec. Talisayan	2	1	1	3	0	3
4	Kec. Batu Putih	2	0	2	3	1	2
5	Kec. Gunung Tabur	2	1	1	3	0	3
6	Kec. Segah	2	0	2	3	2	1
7	<b>Kantor Dinas</b>	4	2	2	6	2	4
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

Berdasarkan jumlah ketersediaan tenaga tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia masih kurang, Pada Jabatan Medik Veteriner masih kurang 12 Orang sedangkan untuk jabatan Paramedik Veteriner masih kurang 15 Orang. Oleh karena itu pada tahun 2024 sudah diusulkan dan dibuka formasi CPNS sebanyak 10 Medik Veteriner/Dokter Hewan dan 10 Paramedik Veteriner.



### E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis wilayah Kabupaten Berau, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan telaahan visi misi sasaran program sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

No.	ISU STRATEGIS
<b>ISU STRATEGIS LEVEL GLOBAL/ NASIONAL</b>	
1	<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium ( <i>Millenium Development Goals</i> )
2	Tantangan Terhadap Perkembangan Revolusi Industri 4.0
3	Perpindahan ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur
4	Terbatasnya anggaran pemerintah pusat akibat COVID -19
<b>ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH/REGIONAL</b>	
1	Pengembangan Agro-Industri Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2	Dampak pembangunan pasca penanganan pandemic COVID-19
3	Pertumbuhan penduduk
4	Alih Fungsi Lahan
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
6	Terbatasnya SDM Pertanian baik petani maupun petugas yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif rendah
7	Lemahnya akses petani terhadap akses permodalan
8	Lemahnya akses petani terhadap akses permodalan
9	Hilirisasi produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura
10	Optimalisasi koordinasi instansi terkait



# **Bab II**

## **Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

- 1. Rencana Strategis**
- 2. Indikator Kinerja Utama**
- 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**
- 4. Perjanjian Kinerja (PK)**



## A. Rencana Strategis

**V**isi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021 adalah:

***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"***

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki fokus pencapaian pada ***misi kedua***.



## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel 8**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						
				Renstra	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian</b>										
	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	2,96	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
		2	Produktivitas Jagung	ton/ha	5,44	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,00
		3	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	3,52	3,62	3,77	3,90	4,02	4,17	4,25
2	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Peternakan</b>										
	Meningkatnya Produksi Peternakan	1	Produksi Daging Sapi	ton	470,18	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
		2	Produksi Telur Ayam Ras	ton	1.753	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17



## **2. Program/Kegiatan**

Program dan kegiatan yang disusun berkaitan dengan upaya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Setiap perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap program dan kegiatan ini sebaiknya didukung oleh perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, serta evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel 9**  
**Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian</b>	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Produktivitas Jagung	ton/ha		Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
			Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
						Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usahatani
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
2	<b>Meningkatkan Kontribusi Sektor Peternakan</b>	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Produksi Telur Ayam Ras	ton		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
							Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian



## **B. Indikator Kinerja Utama**

**P**enyusunan Indikator Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Berau dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai salah satu stake holder yang menangani bidang pertanian sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik didalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel 10**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Produktivitas : Produksi Tanaman Padi dibagi dengan luas areal panen Padi	BPS, Data SP	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		Produktivitas Jagung	Produktivitas : Produksi Tanaman Jagung dibagi dengan luas areal panen Jagung		
		Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	Produktivitas : Produksi Tanaman Cabe dibagi dengan luas areal panen Cabe		
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Produksi Daging Sapi di Kabupaten Berau	Laporan rekapitulasi data populasi, pemotongan, pemasukan, produksi dan konsumsi produk peternakan	Bidang Peternakan  Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Produksi Telur Ayam Ras	Produksi Telur Ayam Ras di Kabupaten Berau		



### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

**R**encana Kinerja Tahunan (RKT) berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. RKT disusun berdasarkan Rencana Strategis dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Pertanian</b>				
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Ton/Ha	3,37	Rp5.247.489.200
	Produktivitas Jagung	Ton/Ha	5,85	
	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	Ton/Ha	4,02	
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alsintan	Unit	85	Rp3.171.489.200
Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	Rp3.171.489.200
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan SDG Tumbuhan	Ha	640	Rp2.076.000.000



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	7	Rp746.000.000
Sub Keg. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	Rp1.330.000.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	Ha	450	Rp974.993.200
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	Dokumen	1	Rp69.996.000
Sub Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	Rp69.996.000
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian (RJIT, DAM Parit, Pintu Air, Optimasi Lahan dll)	unit	5	Rp904.997.200
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	Rp215.999.500
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	Rp174.999.500
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	Rp263.999.700
Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Unit	1	Rp249.998.500



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	4.000	Rp332.898.000
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Kec	10	Rp332.898.000
Sub. Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	158	Rp332.898.000
Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi (Pertanian)	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	42	Rp194.413.400
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Pertanian)	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	22	Rp194.413.400
Sub Keg. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	4	Rp194.413.400
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	87	Rp1.431.540.000
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang melaksanakan penyuluhan pertanian	BPP	10	Rp1.431.540.000



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Desa (BanKeu)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	10	Rp831.540.000
Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	66	Rp250.000.000
Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	20	Rp350.000.000
<b>Sasaran 2. Meningkatkan Produksi Peternakan</b>				
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)	Produksi Daging Sapi	Ton	479,47	Rp1.817.998.100
	Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1973,02	
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan SDG Hewan (IB)	Ekor	950	Rp1.229.999.400
Sub Keg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Laporan	12	Rp1.229.999.400
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada Peternak	Peternak dan Kelompok	15	Rp587.998.700
Sub Keg. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	28.800	Rp402.998.800



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Laporan	36	Rp184.999.900
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	Ha	450	Rp641.751.400
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pelayanan Pemotongan pada RPH yang Beroperasi dan Pemenuhan Kebutuhannya	ekor	1.402.300	Rp641.751.400
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	Unit	1	Rp641.751.400
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	10,00	Rp1.233.830.136
	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	Persen	1,20	
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Vaksinasi Ternak dan HPR	Ekor	4.000	Rp235.000.000
Sub Keg. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	65	Rp235.000.000



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Ekor	7.590	Rp838.830.136
Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	84	Rp838.830.136
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	sampel	275	Rp160.000.000
Sub Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	24	Rp160.000.000
Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi (Pertanian)	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	42	Rp124.999.000
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Pertanian)	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	20	Rp124.999.000
Sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	20	Rp124.999.000
<b>Sekretariat</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	Rp20.179.433.978
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	5	Rp335.199.500
Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp100.000.000



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Rp9.999.500
Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	Rp225.200.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	Rp18.054.582.778
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	126	Rp17.893.642.778
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	Rp160.940.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	Rp50.000.000
Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	Rp50.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	Rp374.947.700
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp14.934.000
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Rp117.586.100



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	Rp3.927.600
Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	Rp66.500.000
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	Rp15.000.000
Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	Rp7.000.000
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp150.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	Rp220.020.000
Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Rp220.020.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	Rp889.894.000
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Rp1.498.000
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp209.400.000



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			K	
1	2	3	4	5
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	Rp678.996.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	Rp254.790.000
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	89	Rp220.000.000
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	Rp9.790.000
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	Rp25.000.000

#### D. Perjanjian Kinerja (PK)

**P**erjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**  
**Peternakan Kabupaten Berau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Ton/Ha	3,37
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	5,85
		Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	Ton/Ha	4,02
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Ton	479,47
		Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.973,02



# **Bab III**

## **Akuntabilitas Kinerja**

- 1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya***
- 2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah***
- 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja***
- 4. Realisasi Anggaran***



## **A. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

**S**ejak tahun 2022 evaluasi sudah berpedoman pada PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian. Evaluasi menitikberatkan pada penilaian implementasi akuntabilitas kinerja pada level organisasi perangkat daerah.

Adapun terhadap hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Berau menunjukkan peningkatan nilai dari 69,05 (B) pada tahun 2022 menjadi 74,61 (BB) pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah baik pada perangkat daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kab. Berau tahun 2023 yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel berikut:



**Tabel 13**  
**Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Berau Tahun 2023**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/Rencana Aksi	Sudah/Belum
1	2	3	4
1	Membuat Crosscutting. Perencanaan Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Telah membuat Crosscutting. Perencanaan Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Sudah
2	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala tiap bulan/tiap triwulan	Telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala tiap bulan/tiap triwulan	Sudah
3	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya.	Telah Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya.	Sudah
4	Membuat Pedoman Teknis dan melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Telah membuat Pedoman Teknis dan melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Sudah



## B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja perangkat daerah mengacu pada hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Trw	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	3,37	tw 1	3,37	3,40	100,89
					tw 2	3,37	3,40	100,89
					tw 3	3,37	3,40	100,89
					tw 4	3,37	3,40	100,89
						<b>3,37</b>	<b>3,40*</b>	<b>100,89</b>
		Produktivitas Jagung	ton/ha	5,85	tw 1	5,85	5,55	94,87
					tw 2	5,85	5,55	94,87
					tw 3	5,85	5,55	94,87
					tw 4	5,85	5,55	94,87
			<b>5,85</b>	<b>5,55*</b>	<b>94,87</b>			
		Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	4,02	tw 1	4,02	3,67	91,29
					tw 2	4,02	3,67	91,29
					tw 3	4,02	3,67	91,29
tw 4	4,02				3,67	91,29		
	<b>4,02</b>	<b>3,67*</b>	<b>91,29</b>					



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Trw	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	ton	479,47	tw 1	119,87	51,08	42,61	
					tw 2	119,87	319,09	266,19	
					tw 3	119,87	50,05	41,75	
					tw 4	119,86	63,69	53,14	
							<b>479,47</b>	<b>483,91</b>	<b>100,93</b>
		Produksi Telur Ayam Ras	ton	1.973,02	tw 1	493,25	302,49	61,33	
					tw 2	493,25	414,41	84,02	
					tw 3	493,25	414,41	84,02	
					tw 4	493,27	361,50	73,29	
							<b>1.973,02</b>	<b>1.492,81</b>	<b>75,66</b>

Keterangan :

\*Angka Sementara



### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

**Tabel 15**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Pertanian</b>					
1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	3,37	3,40*	100,89
2	Produktivitas Jagung	ton/ha	5,85	5,55*	94,87
3	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	4,02	3,67*	91,29
<b>Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan</b>					
1	Produksi Daging Sapi	ton	479,47	483,91	100,93
2	Produksi Telur Ayam Ras	ton	1.973,02	1.492,81	75,66

Keterangan :

\*Angka Sementara



## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sasaran I. Meningkatnya Produksi Pertanian</b>							
1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	3,38	3,14	2,60	3,40*	30,77
2	Produktivitas Jagung	ton/ha	5,97	4,83	5,55	5,55*	0
3	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	4,64	3,77	3,20	3,67*	14,69
<b>Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan</b>							
1	Produksi Daging Sapi	ton	492,00	481,46	502,15	483,91	-3,63
2	Produksi Telur Ayam Ras	ton	1.950,50	2.117,67	2.075,73	1.492,81	-28,08



**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran I. Meningkatnya Produksi Pertanian</b>					
1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	ton/ha	3,62	3,40	93,92
2	Produktivitas Jagung	ton/ha	6,00	5,55	92,5
3	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)	ton/ha	4,25	3,67	86,35
<b>Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan</b>					
1	Produksi Daging Sapi	ton	2.870	1.959,52	68,28
2	Produksi Telur Ayam Ras	ton	11.679	7.636,71	65,39

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Tabel 18**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan Tahun 2024**

<b><i>Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang); Produktivitas Jagung; Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)</i></b>
<b><i>Capaian :</i></b>



**Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)** persentase capaian tahun 2024 adalah 100,89% dengan jumlah realisasi 3,40 ton/ha dari target yang ditetapkan 3,37 ton/ha;

**Produktivitas Jagung** persentase capaian tahun 2024 adalah 94,87% dengan jumlah realisasi 5,55 ton/ha dari target yang ditetapkan 5,85 ton/ha; dan

**Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)** persentase capaian tahun 2024 adalah 91,29% dengan jumlah realisasi 3,67 ton/ha dari target yang ditetapkan 4,02 ton/ha.

#### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja**

(Produktivitas Padi)

1. Faktor cuaca yang baik, sehingga hasil panen relatif baik
2. Adanya bantuan bibit bermutu dalam jumlah cukup
3. Gerakan pengendalian (gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman yang dilakukan secara intensif dan massif
4. Dukungan balai proteksi Propinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian hama dan penyakit
5. Kegiatan Penyuluhan Pertanian dan Pembinaan Poktan/Gapoktan

(Produktivitas Cabe)

1. Harga cabe dipasaran cukup baik, sehingga memacu semangat petani dalam berbudidaya cabe
2. Adanya peningkatan kualitas SDM petani cabe

#### **Faktor Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja**

(Produktivitas Jagung)

1. Minimnya bantuan sarana produksi untuk komoditas jagung, terutama penyediaan benih unggul bermutu sehingga petani banyak yang tidak menanam jagung dan petani banyak menggunakan bibit komposit dan sumber bibit lainnya
2. Terjadinya perubahan iklim

#### **Permasalahan yang Dihadapi :**

1. Keterbatasan sumber daya petani yang melaksanakan kegiatan pertanian;
2. Keterbatasan sumber daya manusia Penyuluh Pertanian untuk pengawalan dan pendampingan petani di lapangan.



3. Terbatasnya kualitas SDM petani dan petugas
4. Terbatasnya dukungan anggaran dalam penyediaan sarana produksi pertanian
5. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu
6. Penyampaian proposal hibah sering terlambat
7. Rekanan/penyedia barang baru tersedia di pertengahan tahun

***Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Masalah dan Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :***

1. Pengadaan benih Jagung, Padi, Cabe dan Bawang merah
2. Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
3. Gerakan pengendalian (gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis budidaya dan pasca panen bagi petani.
5. Peningkatan kualitas SDM bagi petani dan petugas melalui kegiatan pembelajaran
6. Usulan proposal hibah sebelum tahun berjalan harus sudah siap dan didisposisi Bupati
7. Perencanaan kegiatan dengan baik
8. Koordinasi dengan penyedia barang di awal tahun

***Produksi Daging Sapi; Produksi Telur Ayam Ras***

***Capaian :***

***Produksi Daging Sapi*** persentase capaian tahun 2024 adalah 100,93% dengan jumlah realisasi 483,91 ton dari target yang ditetapkan 479,47 ton;

***Produksi Telur Ayam Ras*** persentase capaian tahun 2024 adalah 75,66% dengan jumlah realisasi 1492,81 ton dari target yang ditetapkan 1973,02 ton.

***Faktor Pendukung Capaian Kinerja***

(Produksi Daging Sapi)

1. Suplai daging beku dari luar daerah untuk menutup kekurangan stok dan kebutuhan daging sapi di Kabupaten Berau.
2. Partisipasi pro aktif dari peternak, masyarakat, serta aparat kampung untuk melakukan pencegahan PHMSZ di kampung masing-masing.



3. Dukungan penuh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang terhadap program pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis
4. Partisipasi pro aktif Kepala, Kasubbag TU, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Petugas di 6 Kecamatan
5. Komunikasi dan koordinasi dengan staf dan pelaku usaha pemotongan hewan telah terjalin baik
6. Koordinasi antar OPD terutama Kementerian Agama Kab. Berau cukup baik dalam upaya pengurusan sertifikasi halal RPH
7. Dukungan positif dari Pemerintah Daerah
8. Bertambahnya Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan seperti Penggilingan Bakso/Daging, Penjual Bakso, Penjual Ayam, Budidaya Ternak, Usaha Distribusi/Ritel (Gudang pendingin, Kios Daging, Unit Pendingin dll)

**Faktor Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja**

(Produksi Daging Sapi dan Produksi Telur Ayam Ras)

1. Jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas Inseminator untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB.
2. Kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.
3. Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang dilaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.
4. Masih kurangnya jumlah petugas inseminator di lapangan, sehingga diperlukan adanya penambahan petugas inseminator.
5. Lambatnya pengiriman N2 cair dari samator sehingga mengakibatkan pendistribusian N2 cair dan straw ke depo di UPT Puskeswan jadi terlambat juga.
6. Sistem pemeliharaan ternak didominasi oleh ekstensif sehingga optimalisasi reproduksi kurang maksimal.
7. Adanya ancaman wabah penyakit PMK yang dapat mempengaruhi masa birahi pada ternak.



8. Tingginya pemotongan ternak betina produktif.
9. Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sehingga dapat berpengaruh terhadap siklus birahi ternak.
10. Populasi ayam ras untuk petelur yang berkurang akibat beban pakan yang harganya cenderung naik sehingga peternak mengurangi jumlah ternaknya untuk menutupi cost produksinya
11. Target lebih tinggi dibanding dengan populasi ternak yang cenderung menurun terutama dikarenakan mewabahnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) yang menyebabkan terhambatnya lalu lintas ternak
12. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dokter hewan dan paramedik veteriner yang berhubungan langsung dengan capaian kinerja bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

1. Permasalahan utama dalam peningkatan jumlah populasi ternak dikarenakan angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta akibat keterbatasan pengetahuan peternak mengenai Good Farming Practice (GFP). Hal lain yang menjadi permasalahan adalah adanya wabah penyakit menular seperti PMK yang berpengaruh terhadap produktifitas serta banyaknya pemotongan betina produktif ternak lokal dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Berau.
2. Cara pemeliharaan ternak yang tidak memenuhi syarat juga memungkinkan penularan dari ternak yang sakit kepada ternak yang sehat. Disamping itu kurangnya komunikasi antara sumber informasi antar wilayah juga akan mempersulit kegiatan pengendalian penyakit secara tuntas
3. UPT RPH Gunung Tabur belum memiliki sertifikat halal atas produk asal hewan serta Nomor Kontrol Veteriner.
4. Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha untuk mengurus sertifikat halal dan NKV
5. Topografi Kabupaten Berau yang Beragam berupa rawa dan bukit dan jauhnya lokasi ternak masyarakat serta cuaca ekstrem yang tidak menentu



***Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Masalah dan Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :***

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi ternak sapi maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan, oleh karena itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.
2. Memberikan akses kemudahan dalam hal pelayanan terhadap pelaku usaha termasuk pemberian ijin usaha peternakan seperti rekomendasi dan lainnya dari pimpinan.
3. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya ke tingkat petani/peternak dalam hal peningkatan produksi peternakan.
4. Melaksanakan pembinaan-pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pelaku usaha akan bahaya penggunaan bahan berbahaya pada Produk Pangan Asal Hewan serta pengurusan sertifikasi halal dan NKV.
5. Optimalisasi dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran operasional ke Lapangan.
6. Meningkatkan Koordinasi berupa Rapat Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan Rapat strategi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pencapaian target kinerja.
7. Mengusulkan pembukaan formasi kebutuhan SDM Medik Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk ditempatkan di UPT Pusat Kesehatan Hewan.



## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran%	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5
<b>Sasaran I : Meningkatnya Produksi Pertanian</b>				
1	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	95,68%	85,96%	9,72%
2	Produktivitas Jagung			
3	Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)			
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan</b>				
1	Produksi Daging Sapi	88,29%	87,76%	0,53%
2	Produksi Telur Ayam Ras			

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya cukup baik, namun dilihat dari aspek sumber daya manusia masih sangat kurang.

### - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Jumlah PPL saat ini sebanyak 45 orang dengan jumlah kelompok tani sebanyak 847 kelompok, maka rasio penyuluh terhadap kelompok tani saat ini 18 (artinya setiap penyuluh harus membina rata-rata 18 kelompok tani). Dipandang dari luas wilayah kerja, jarak antar Kampung/Kecamatan maka jumlah penyuluh saat ini masih sangat kurang. Hal ini erat kaitannya dengan mobilitas penyuluh dapat menjadi kendala dan beban kerja yang tinggi bisa menyebabkan penyuluhan kurang efektif.

### - Petugas Inseminator

Petugas inseminator adalah tenaga teknis yang bertugas melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sebagai bentuk Upaya mendorong pertumbuhan populasi ternak. Saat ini jumlah tenaga inseminator di lapangan sebanyak 6 orang dengan wilayah kerja 13 Kecamatan. Jika jumlah ideal untuk setiap Kecamatan sebanyak 2 sampai 3 petugas



inseminator. Maka jumlah ini masih belum efisien untuk mendukung Program Peningkatan Populasi Ternak.

- Perawat Ternak dan Pemelihara Kebun di UPT. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Sebanyak 3 orang perawat ternak yang melaksanakan pemeliharaan ternak yaitu sapi 16 ekor dan kambing 43 ekor merupakan jumlah tenaga yang jauh dari ideal. Luas lahan yang ada saat ini juga belum optimal dalam pemanfaatannya sebagai bank pakan, hal ini dikarenakan belum adanya tenaga pemelihara kebun hijauan pakan ternak.

- Petugas Medik/Paramedik Veteriner

Masih banyak kekurangan SDM Medik dan Paramedik Veteriner di Unit kerja sesuai lokasi. Pada Jabatan Medik Veteriner masih kurang 12 Orang sedangkan untuk jabatan Paramedik Veteriner masih kurang 15 Orang, pemenuhan ketersediaan SDM Medik dan Paramedik Veteriner ini sangat penting karena untuk tindak lanjut penanganan kasus penyakit di lapangan harus segera sesuai panggilan peternak.

Sumber Daya Manusia yang tidak memadai akan menyebabkan beban kerja berlebihan sehingga dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Hal ini akan berdampak pada pencapaian kinerja perangkat daerah.

## **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja per sasaran dijabarkan sebagai berikut:

### **Sasaran I. Meningkatnya Produksi Pertanian**

**Tabel 20**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran I Tahun 2024**



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>					
<b>Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran I. Meningkatkan Produksi Pertanian</b>					
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)</b>	<b>Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)</b>	ton/ha	<b>3,37</b>	<b>3,40</b>	<b>100,89</b>
	<b>Produktivitas Jagung</b>	ton/ha	<b>5,85</b>	<b>5,55</b>	<b>94,87</b>
	<b>Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)</b>	ton/ha	<b>4,02</b>	<b>3,67</b>	<b>91,29</b>
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alsintan	Unit	92	92	100
Sub Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	1	1	100
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDG Tumbuhan	Ha	936	929	99,25
Sub Keg. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	7	7	100
Sub Keg. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	5	5	100
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan</b>	<b>Ha</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100</b>



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>					
<b>Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	dokumen	1	1	100
Sub Keg. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	1	1	100
Kegiatan Penmbangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit	6	5,7	95
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	1	100
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	2	100
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	1,7	85
Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Direhabilitasi	unit	1	1	100
<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Ha</b>	<b>4.000</b>	<b>3.361,5</b>	<b>84,04</b>



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>					
<b>Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	kec	10	10	100
Sub. Keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	158	198,25	125,47
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi (Pertanian)</b>	<b>Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis) usaha pertanian	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	22	22	100
Sub Keg. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	4	4	100
<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Petani</b>	<b>persen</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	kec	10	10	100
Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10	10	100



PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	66	66	100
Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	20	20	100

Pada sasaran 1 jumlah program pendukung yaitu 5 program terdiri dari 7 Kegiatan dan 13 sub kegiatan.

### **Program dengan Capaian Indikator Kinerja 100% (3 Program)**

#### **1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Capaian indikator kinerja : ***Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan*** persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah realisasi 450 Ha.

##### **1.1. Kegiatan *Pengembangan Prasarana Pertanian***



Sub kegiatan : **Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B**

**IK : Jumlah Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B**

Prasarana pertanian berupa lahan perlu untuk ditetapkan peruntukannya agar tidak beralih fungsi untuk kegiatan lain, Lahan pertanian khususnya Lahan Baku Sawah di Kabupaten Berau berdasarkan laporan akhir kegiatan penyusunan data sawah update tahun 2023 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 23,27% dari 1.919 ha data LBS 2019 menjadi 2.365,63 ha pada tahun 2023.

Dengan ditetapkannya lahan baku sawah tersebut maka akan menjadi dasar untuk melakukan proses produksi guna menjaga ketersediaan pangan, selain pemanfaatan lahan yang sudah ada, perlu juga untuk dilakukan pengembangan lahan pertanian pangan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Berau yang memiliki potensi lahan disektor pertanian. Sub Kegiatan ini menitik beratkan pada kegiatan pembinaan/monitoring pemanfaatan/pengelolaan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Keputusan Bupati.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Keputusan Bupati Berau No 2 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 adalah 2.311,1 Ha dengan perincian per Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Biatan : 178,31 Ha
- Kecamatan Gunung Tabur : 664 Ha
- Kecamatan Kelay : 114,09 Ha
- Kecamatan Sambaliung : 483,31 Ha
- Kecamatan Segah : 104,47 Ha
- Kecamatan Tabalar : 438,82 Ha
- Kecamatan Talisayan : 58,75 Ha
- Kecamatan Teluk Bayur : 269,34 Ha

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Rangkap jabatan yang terlalu banyak terhadap pemangku kegiatan ini.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.
- Regulasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk mencapai target kinerja.



- Ketersediaan tenaga teknis yang memahami pemetaan lahan belum tersedia, hal ini sangat diperlukan untuk melakukan validasi data lahan menggunakan citra satelit.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Memisahkan antara pemegang kegiatan penyediaan Sarana dengan kegiatan penyediaan Pra Sarana Pertanian, agar pejabat tersebut bisa lebih fokus dan lebih bisa berinovasi, mengingat ini dua hal yang berbeda.
- Mengisi jabatan fungsional yang kosong sesuai peta jabatan yang ada pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, hal ini dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan dan untuk meningkatkan profesionalisme kerja pengampu kegiatan.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah guna memperoleh efektifitas kinerja.
- Mengusulkan permohonan tenaga teknis.

1.2. Kegiatan ***Pembangunan Prasarana Pertanian***

Sub kegiatan : ***1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit; 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air; 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani***

**IK : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara; Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara; Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi**

Prasarana pertanian merupakan faktor penunjang utama yang harus dipenuhi dalam proses produksi pertanian agar kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai harapan dan berkelanjutan guna pemenuhan kebutuhan pangan. Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian menjadi penting agar setiap saat dibutuhkan selalu tersedia, hal ini akan memperlancar proses produksi guna mendapat hasil yang maksimal. Prasarana terkait diantaranya berupa pembuatan, rehab maupun pemeliharaan DAM Parit, Pintu Air, dan Jaringan Irigasi Usaha Tani.

- DAM Parit pada saluran irigasi guna memperlancar sistem penyediaan air pada lahan sawah.
- Pintu Air pada saluran irigasi tersier guna memperlancar sistem penyediaan air pada lahan sawah.
- Semenisasi atau rehab saluran irigasi tersier guna memperlancar sistem penyediaan air pada lahan sawah.



#### Permasalahan yang Dihadapi :

- Rangkap jabatan yang terlalu banyak terhadap pemangku kegiatan ini.
- Belum adanya tenaga teknis dibidang konstruksi bangunan irigasi.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.
- Regulasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.
- Ketersediaan tenaga teknis konstruksi bangunan irigasi yang belum ada, hal ini sangat diperlukan untuk menganalisa secara teknis kebutuhan pembangunan irigasi (termasuk DAM Parit dan Pintu Air), mulai dari kesesuaian antara bentuk dan material yang digunakan dengan kondisi lokasi yang akan dibangun

#### Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :

- Memisahkan antara pemegang kegiatan penyediaan Sarana dengan kegiatan penyediaan Pra Sarana Pertanian, agar pejabat tersebut bisa lebih fokus dan lebih bisa berinovasi, mengingat ini dua hal yang berbeda.
- Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis dibidang konstruksi bangunan irigasi pada staf yang ada saat ini, atau melakukan penambahan personil yang sesuai kebutuhan.
- Mengisi jabatan fungsional yang kosong sesuai peta jabatan yang ada pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, hal ini dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan dan untuk meningkatkan profesionalisme kerja pengampu kegiatan.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

#### Hibah Prasarana Tahun 2024 yang Terlaksana :

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembangunan DAM Parit	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	1	Unit	173.533.500	APBD II	Analisa OPD
2.	Pembangunan Pintu Air	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	2	Unit	143.930.000	APBD II	Analisa OPD
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	1	Unit	199.591.250	APBD II	Analisa OPD
<b>Dukungan Sumber Dana selain APBD II</b>								
1.	Irigasi Perpompaaan Besar Wil. Tengah	Buyung-Buyung	Sumber Rejeki	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD
2.	Irigasi Perpompaaan Besar	Labanan Jaya	Manunggal Karsa II	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD



	Wil. Tengah							
3.	Irigasi Perpomp aan Besar Wil. Tengah	Labanan Jaya	Manunggal Karsa VI	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD
4.	Irigasi Perpomp aan Besar Wil. Tengah	Labanan Jaya	Manunggal Karsa IX	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD
5.	Irigasi Perpomp aan Besar Wil. Tengah	Labanan Jaya	Manunggal Karsa I	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD
6.	Irigasi Perpomp aan Besar Wil. Tengah	Labanan Jaya	Manunggal Karsa IV	1	Paket	112.800.000	APBN-TP	Analisa OPD
7.	Irigasi Perpipa an	Tasuk	P3A Mandiri	2	Paket	188.000.000	APBN-TP	Analisa OPD
8.	Irigasi Perpipa an	Labanan Jaya	Gapoktan Manunggal Karsa	3	Paket	282.000.000	APBN-TP	Analisa OPD
9.	Irigasi Perpipa an	Melati Jaya	Gapoktan Bina Tani Mandiri	3	Paket	282.000.000	APBN-TP	Analisa OPD
10.	Irigasi Perpipa an	Semurut	Gapoktan Mapadeleng	3	Paket	282.000.000	APBN-TP	Analisa OPD
11.	Irigasi Perpipa an	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	4	Paket	376.000.000	APBN-TP	Analisa OPD

Sub kegiatan : **4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**

**IK : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara**

Kawasan pertanian di Kabupaten Berau khususnya tanaman padi dan jagung perlu dipenuhi dan dikelola kebutuhan prasarana pertanian lainnya mengingat sumber-sumber air cukup banyak tersedia, baik melalui program pemerintah, swasta maupun swadaya Masyarakat. Dengan adanya program kegiatan ini diharapkan ketersediaan prasarana pertanian lainnya bagi petani dapat terpenuhi agar proses produksi tidak terganggu dan diharapkan dapat menunjang untuk peningkatan Indeks Pertanaman maupun Provitanya.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Rangkap jabatan yang terlalu banyak terhadap pemangku kegiatan ini.
- Belum adanya tenaga teknis dibidang konstruksi bangunan prasarana pertanian.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.



- Regulasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk mencapai target kinerja.
- Ketersediaan tenaga teknis konstruksi bangunan prasarana pertanian yang belum ada, hal ini sangat diperlukan untuk menganalisa secara teknis kebutuhan pembangunan Prasarana pertanian mulai dari kesesuaian antara bentuk dan material yang digunakan dengan kondisi lokasi yang akan dibangun.
- Penyerapan belanja Jalan Usaha Tani tidak sepenuhnya terserap dikarenakan material batu pada lapisan atas jalan tidak tersedia di lokasi.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Memisahkan antara pemegang kegiatan penyediaan Sarana dengan kegiatan penyediaan Pra Sarana Pertanian, agar pejabat tersebut bisa lebih fokus dan lebih bisa berinovasi, mengingat ini dua hal yang berbeda.
- Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis dibidang konstruksi bangunan irigasi pada staf yang ada saat ini, atau melakukan penambahan personil yang sesuai kebutuhan.
- Mengisi jabatan fungsional yang kosong sesuai peta jabatan yang ada pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, hal ini dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan dan untuk meningkatkan profesionalisme kerja pengampu kegiatan.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah guna memperoleh efektifitas kinerja.
- Evaluasi Pihak Ketiga.

**Hibah Prasarana Lainnya Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya (Pembangunan Jalan Usaha Tani)	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	1	Unit	165.100.000	APBD II	Analisa OPD
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya (Lanjutan Lantai Jemur)	Purna Sari Jaya	Gapoktan Maju Bersama	1	Unit	85.384.000	APBD II	Pokir



## 2. Program Perizinan Usaha Pertanian

Capaian indikator kinerja : **Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan yang Difasilitasi (Pertanian)** persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah realisasi 22 Poktan, gapoktan dan Pelaku Usaha.

### 1. Kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan : **Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

**IK : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

Pemberian rekomendasi pembelian bbm jenis tertentu (Khusus Alat Mesin Pertanian) dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau sesuai dengan permohonan yang memenuhi persyaratan. Secara umum syarat-syarat dapat dengan baik dipenuhi oleh pemohon karena adanya koordinasi maksimal dengan kepala kampung, PPL setempat serta camat.

#### **Permasalahan yang Dihadapi :**

- Minimnya pengetahuan petani penagkar yang ada di kecamatan Sambaliung dalam hal regulasi pendaftaran dan sertifikasi benih tanaman pangan
- Dalam penilaian kelayakan rekomendasi BBM pertanian yang diusulkan petani di Kampung Tubaan pada alat mesin yang diusulkan ada sebagian yang rusak dan ada juga sebagian alat yang tidak memenuhi syarat karena peruntukkan nya bukan di usaha pertanian
- Kampung Tubaan mendapatkan alokasi Anggaran untuk pengembangan Bawang Merah, namun pada kelompok tani penerima ada beberapa anggota yang kurang memahami tentang penanganan hama penyakit bagi komoditas dimaksud.

#### **Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Untuk usulan pendaftaran sertifikasi benih Tanaman Pangan nantinya akan didampingi oleh petugas penyuluh dan POPT setempat
- Saat verifikasi kebutuhan BBM pertanian dikampung Tubaan usulan BBM yang akan diterbitkan rekomendasinya nanti adalah hanya alat yang menunjang usaha pertanian, dan akan dipilah alat yang tidak sesuai untuk dikeluarkan dari usulan
- Dalam kegiatan temu usaha/sosialisasi yang dilaksanakan disampaikan oleh pemateri dari petugas POPT Kabupaten dan telah diberikan sesi diskusi, serta nantinya kedepan akan dilaksanakan pemantauan budidaya bersama petugas dimaksud.



### 3. Program Penyuluhan Pertanian

Capaian indikator kinerja : **Cakupan Bina Kelompok Petani** persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah realisasi 86 persen.

#### Kegiatan **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Sub kegiatan : **1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;**

**IK : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya**

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. SDM mempunyai kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan kita, harus memahami perubahan teknologi, dan memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat.

Karenanya perlu adanya peningkatan SDM penyuluh pertanian serta pemenuhan sarana prasarana dilapangan, baik itu berupa kendaraan roda dua dan sarana prasarana penunjang lainnya yang ada dikantor BPP agar sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

#### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Terdapatnya jaringan internet di semua wilayah pengembangan pertanian, sehingga mempermudah sistem komunikasi antara Petugas dengan petani.
- Terlaksananya pemeliharaan/pegecetan Kantor BPP Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Biatan
- Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Penyuluh Pertanian Lapangan

#### **Permasalahan yang Dihadapi :**

- Terbatasnya dan semakin berkurangnya tenaga Penyuluh Pertanian di Lapangan, karena banyak yang pensiun
- SDM Petani semakin berkurang, dan Kurang minatnya pemuda tani dalam berusaha tani.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.
- Terdapatnya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan menjadi non tanaman pangan
- Terdapatnya serangan OPT yang mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman pangan



- Terbatasnya daya tampung / permintaan pasar, pada saat hasil panen melimpah, yang menyebabkan harga jual hasil pertanian tidak stabil

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Segera mungkin pengangkatan tenaga penyuluh baik itu jalur CPNS atau tenaga kontrak
- Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan penyuluh dilapangan.
- Kendaraan Roda 4 agar memudahkan kita dalam pelaksanaan pembinaan BPP dan terkait kegiatan lainnya.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

Sub kegiatan : **2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;**

**IK : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya**

Dalam kegiatan kelembagaan ini lebih difokuskan adanya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi agar lebih mengetahui fungsi dari kelembagaan petani, kelompok-kelompok tani yang sudah ada maupun yang belum terbentuk dengan memperhatikan secara administrasi secara rutin karena terkait dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dimana setiap lembaga atau kelompok tani sudah terdaftar secara resmi dan memiliki badan hukum sesuai aturan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk memudahkan lembaga atau kelompok tani dalam mendapatkan bantuan-bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat yaitu seperti adanya bantuan pupuk, alat mesin pertanian, benih/bibit komoditas pertanian dan peternakan.

Terkait dengan kelembagaan petani maka yang menjadi sasaran adalah Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang berada di tingkat Desa dan Kecamatan.

**Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan pelatihan serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang memudahkan dalam berinteraksi dengan obyek pembinaan.
- Melaksanakan kegiatan lomba petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian berprestasi, penyuluh swadaya berprestasi dan Balai Penyuluhan berprestasi pada tahun 2024.



- Melaksanakan kegiatan Pra Pekan Daerah di Kabupaten Berau bersama dengan anggota KTNA yang berada di Kabupaten dan Kecamatan.
- Melakukan sinergi dengan kegiatan Provinsi yang mempunyai obyek binaan yang sama, sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Kurangnya Personil dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan baik secara administrasi maupun operasional untuk ke lapangan.
- Kurangnya sarana kendaraan dinas operasional sehingga memperlambat kegiatan yang sudah terjadwal.
- Ruang yang kurang memadai yang dapat mempengaruhi kinerja
- Sarana dan prasarana yang tersedia sudah banyak yang kurang layak sehingga tidak memberikan rasa nyaman dalam melakukan pekerjaan
- Secara administrasi yang berhubungan dengan surat penugasan dan lain-lain dengan adanya sistem elektronik secara online masih kurang maksimal dalam penggunaannya.
- Ketidak sesuaian dalam penugasan yang diberikan dalam hal pelaksanaan kegiatan.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Menambah personil yang bisa bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan baik secara administrasi maupun di lapangan
- Menambah sarana kendaraan dinas operasional untuk memudahkan dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan ke lokasi-lokasi petani yang ada di Kecamatan dan Desa.
- Melakukan penataan terhadap ruangan-ruangan untuk kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan
- Memperhatikan secara rutin kelayakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pekerjaan
- Memberikan kemudahan dan kerjasama yang baik sehingga dapat memperlancar kegiatan yang telah ditargetkan baik secara administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.

**Hibah Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kendaraan Roda Tiga	Tabalar/Buyung-Buyung	Harapan Jaya	1	unit	45.117.000	APBD II	Pokir



Sub kegiatan : **3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**

**IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, sebagai dasar umum bagi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada petani melalui sistem penyuluhan. Secara berjenjang lembaga penyelenggara penyuluhan di tingkat Kabupaten Berau adalah UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Berau, sedangkan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan di dalam wadah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPP) Kabupaten Berau, yang dasar hukum pembentukan organisasi ini adalah Peraturan Bupati 7 Tahun 2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang penyuluhan pertanian.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Terbatasnya dan semakin berkurangnya tenaga Penyuluh Pertanian di Lapangan, karena banyak yang pensiun
- SDM Petani semakin berkurang, dan Kurang minatnya pemuda tani dalam berusaha tani.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.
- Terdapatnya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan menjadi non tanaman pangan
- Terdapatnya serangan OPT yang mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman pangan
- Terbatasnya daya tampung / permintaan pasar, pada saat hasil panen melimpah, yang menyebabkan harga jual hasil pertanian tidak stabil

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Segera mungkin pengangkatan tenaga penyuluh baik itu jalur CPNS atau tenaga kontrak
- Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan penyuluh dilapangan.
- Kendaraan Roda 4 agar memudahkan kita dalam pelaksanaan pembinaan BPP dan terkait kegiatan lainnya.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.



## **Program dengan Capaian Indikator Kinerja < 100% (2 Program)**

### **1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Capaian indikator kinerja : **Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)** persentase capaian tahun 2024 adalah 100,89% dengan jumlah realisasi 3,40 ton/ha; **Produktivitas Jagung** persentase capaian tahun 2024 adalah 94,87% dengan jumlah realisasi 5,55 ton/ha; **Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)** persentase capaian tahun 2024 adalah 91,29% dengan jumlah realisasi 3,67 ton/ha.

#### **1.1. Kegiatan *Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***

Sub kegiatan : **1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**

**IK : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**

Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan terhadap bantuan alat mesin pertanian yang mendukung proses produksi sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura agar sesuai dengan fungsinya, selain itu Sub Kegiatan ini juga memfasilitasi pengadaan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian yang dibutuhkan oleh para petani melalui Kelembagaan Petani baik berupa Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) baik sarana pra panen, panen maupun pasca panen guna peningkatan produktivitas.

Sarana pertanian berupa alat mesin pertanian merupakan faktor penunjang utama yang harus dipenuhi dalam proses produksi pertanian agar kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai harapan dan berkelanjutan guna pemenuhan kebutuhan pangan. Pengolahan lahan pertanian secara mekanisasi menjadi penting agar lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya dan cakupan bukaan lahan, hal ini tentu sangat berdampak pada proses produksi. Dalam proses produksi alat mesin pertanian dapat dikelompokkan menjadi 2 fase yaitu fase pra panen dan fase pasca panen, Dimana pada masing-masing fase tersebut membutuhkan alat mesin pertanian guna memudahkan para petani untuk melakukan aktivitas produksinya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

#### **Permasalahan yang Dihadapi :**

- Rangkap jabatan yang terlalu banyak terhadap pemangku kegiatan ini.
- Keterbatasan petugas teknis pelaksana sub kegiatan ini.
- Keterbatasan sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kelapangan.
- Regulasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk mencapai target kinerja.



- Ketersediaan tenaga teknis di bidang perbengkelan alsintan yang belum ada, hal ini sangat diperlukan untuk menganalisa secara teknis alat mesin pertanian yang ada, mulai dari analisa kerusakan hingga rekomendasi yang bisa diberikan kepada para pemegang alsintan ditingkat petani.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Memisahkan antara pemegang kegiatan penyediaan Sarana dengan kegiatan penyediaan Pra Sarana Pertanian, agar pejabat tersebut bisa lebih fokus dan lebih bisa berinovasi, mengingat ini dua hal yang berbeda.
- Mengisi jabatan fungsional yang kosong sesuai peta jabatan yang ada pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, hal ini dilakukan untuk menghindari rangkap jabatan dan untuk meningkatkan profesionalisme kerja pengampu kegiatan.
- Menyederhanakan regulasi dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah guna memperoleh efektifitas kinerja.
- Mengusulkan tenaga teknis.

**Hibah Sarana Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rumah Dryer	Buyung-Buyung	Sumber Harapan Bersama	1	Unit	375.134.000	APBD II	Pokir
2	Mesin Dryer	Buyung-Buyung	Sumber Harapan Bersama	1	Unit	755.800.000	APBD II	Pokir
3	Traktor Roda 2	Rantau Panjang	Gap. Sehati Tunas Mekar	1	Unit	31.872.000	APBD II	Analisa OPD
4	Traktor Roda 2	Pilanjau	Berkah Tani Sejahtera	1	Unit	31.872.000	APBD II	Musren bang
5	Traktor Roda 2	Tasuk	Banua Indah	1	Unit	31.872.000	APBD II	Analisa OPD
6	Traktor Roda 2	Karangan	Tanduk Payau	1	Unit	31.872.000	APBD II	Musren bang
7	Traktor Roda 2	Merancang Ulu	Harapan Baru	1	Unit	31.872.000	APBD II	Musren bang
8	Traktor Roda 2	Semurut RT 1	Harapanku	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
9	Traktor Roda 2	Semurut	Bintang Timur II	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
10	Traktor Roda 2	Buyung-Buyung	Sumber Rejeki	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
11	Traktor Roda 2	Buyung-Buyung	Karya Baru	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
12	Traktor Roda 2	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	3	Unit	95.616.000	APBD II	Pokir



13	Traktor Roda 2	Sukan Tengah	Hortikultura Cinta Amanah	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
14	Traktor Roda 2	Tg Perengat	Harapan	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
15	Traktor Roda 2	Merancang Ilir	Pada Idi	1	Unit	31.872.000	APBD II	Pokir
16	Traktor Roda 4	Buyung-Buyung	Sumber Harapan Bersama	1	Unit	409.921.000	APBD II	Pokir
17	Traktor Roda 2 Rotary	Tg Perengat	Sumber Rejeki II	1	Unit	44.884.700	APBD II	Musren bang
18	Traktor Roda 2 Rotary	Tasuk	Sumber Daya	1	Unit	44.884.700	APBD II	Musren bang
19	Cultivator	Inaran	Gap. Jaya Mandiri	1	Unit	20.424.767	APBD II	Musren bang
20	Cultivator	Gurimban g	Berkat Usaha	1	Unit	20.424.767	APBD II	Musren bang
21	Cultivator	Pilanjau	Karya Bersama	1	Unit	20.424.767	APBD II	Musren bang
22	Cultivator	Sambaliun g	Makmur Sejahtera	1	Unit	20.424.767	APBD II	Analisa OPD
23	Cultivator	Sambaliun g	Limunjan Jaya	1	Unit	20.424.767	APBD II	Pokir
24	Cultivator	Sambaliun g	Banua Sanggam Seramut	1	Unit	20.424.767	APBD II	Pokir
25	Alat Perontok Serba Guna	Maluang	Bunyu Jaya	1	Unit	32.510.000	APBD II	Analisa OPD
26	Alat Perontok Serba Guna	Sumber Mulya	Sri Rejeki I	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
27	Alat Perontok Serba Guna	Sambaliun g	Jaya Kasih	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
28	Alat Perontok Serba Guna	Tabalar Ulu	Luang Sengi Jaya	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
29	Alat Perontok Serba Guna	Melati Jaya	Bengawan Jaya	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
30	Alat Perontok Serba Guna	Cipuak	Gap. Capuak Mandiri	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
31	Alat Perontok Serba Guna	Tubaan	Tubaan Makmur	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang
32	Alat Perontok	Purna Sari Jaya	Gap. Maju Bersama	1	Unit	32.510.000	APBD II	Musren bang



	Serba Guna							
33	Alat Perontok Serba Guna	Sambaliung	Bukit Raya	1	Unit	32.510.000	APBD II	Analisa OPD
34	Alat Perontok Serba Guna	Harapan Maju	Karya Tani	1	Unit	32.510.000	APBD II	Analisa OPD
35	Mesin Rumpuk 4 PK	Birang	Satu Hati	30	Unit	75.000.000	APBD II	Pokir
36	Hand Spayer	Tubaan	Mandiri Sejahtera	20	Unit	21.940.000	APBD II	Pokir
37	Traktor Roda 2	Buyung-Buyung	Hasil Karya 8	1	Unit	33.000.000	APBD II	Pokir
38	Cultivator	Gurimban g	Gurimbang Permai 2	1	Unit	22.892.000	APBD II	Analisa OPD
39	Cultivator	Gurimban g	Tunggal Jaya	1	Unit	22.892.000	APBD II	Analisa OPD
40	Cultivator	Sambakungan	Nomi Jaya Makmur	1	Unit	22.892.000	APBD II	Analisa OPD
41	Cultivator	Teluk Bayur	Teluk Bayur Permai	2	Unit	45.784.000	APBD II	Pokir
42	Cultivator	Teluk Bayur	Harapan Makmur	1	Unit	22.892.000	APBD II	Analisa OPD
<b>Dukungan Sumber Dana selain APBD II</b>								
43	Combine Harvester Besar (Padi)	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
44	Traktor Roda 2 Singkal	Pilanjau	Poktan Saka Bulu 2	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
45	Traktor Roda 2 Singkal	Maluang	Poktan Bunyu Jaya	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
46	Traktor Roda 2 Singkal	Melati Jaya	Poktan Sabar Subur	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
47	Traktor Roda 2 Singkal	Melati Jaya	Poktan Bugis Mandiri	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
48	Hand Sprayer	Sambaliung	Poktan Sambaliung Permai	12	Unit		APBD I	Analisa OPD
49	Hand Sprayer	Teluk bayur	Poktan Harapan Makmur	14	Unit		APBD I	Analisa OPD
50	Hand Sprayer	Buyung-Buyung	Poktan Sumber Harapan Jaya	30	Unit		APBD I	Analisa OPD
51	Cultivator	Gunung Tabur	Poktan Solata	1	Unit		APBD I	Analisa OPD
52	Cultivator	Gunung Tabur	Poktan Anugrah Jemalay	1	Unit		APBD I	Analisa OPD



53	Traktor Roda 4	Labanan Jaya	Manunggal Karsa 2	1	Unit	382.910.000	APBN	Analisa OPD
54	Traktor Roda 4	Labanan Jaya	Manunggal Karsa 8	1	Unit	382.910.000	APBN	Analisa OPD
55	Traktor Roda 4	Semurut	Lestari Manis	1	Unit	382.910.000	APBN	Analisa OPD
56	Traktor Roda 2	Labanan Jaya	Manunggal Karsa 10	1	Unit	35.315.000	APBN	Analisa OPD
57	Traktor Roda 2	Semurut	Bintang Timur 3	1	Unit	35.315.000	APBN	Analisa OPD
58	Traktor Roda 2	Semurut	Mapadeceng	1	Unit	34.335.000	APBN	Analisa OPD
59	Traktor Roda 2 Rotary	Buyung-Buyung	Sumber Harapan Jaya	1	Unit	45.152.000	APBN	Analisa OPD
60	Traktor Roda 2	Tabalar Muara	Bunga Mekar I	1	Unit	35.315.000	APBN	Analisa OPD
61	Traktor Roda 2	Tabalar Muara	Bunga Mekar IV	1	Unit	35.315.000	APBN	Analisa OPD
62	Traktor Roda 2	Bumi Jaya	Gap. Sapta Manunggal Tani	1	Unit	34.335.000	APBN	Analisa OPD
63	Traktor Roda 2	Melati Jaya	Maju Jaya	1	Unit	35.315.000	APBN	Analisa OPD
64	Traktor Roda 2	Bangun	Gap. Bangun Sejahtera	1	Unit	34.335.000	APBN	Analisa OPD
65	Traktor Roda 2	Biatan Ilir	Gap. Biatan Bersama	1	Unit	34.335.000	APBN	Analisa OPD
66	Pompa Air 4"	Labanan Jaya	Gap Manunggal Karsa	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
67	Pompa Air 4"	Semurut	Mapadeceng	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
68	Pompa Air 4"	Semurut	Harapanku	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
69	Pompa Air 4"	Semurut	Padi Menguning	1	Unit	29.750.000	APBN	Analisa OPD
70	Pompa Air 4"	Semurut	Lestari Manis	1	Unit	29.750.000	APBN	Analisa OPD
71	Pompa Air 4"	Buyung-Buyung	Hasil Karya 4	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
72	Pompa Air 4"	Buyung-Buyung	Hasil Karya 6	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
73	Pompa Air 4"	Buyung-Buyung	Hasil Karya IX	1	Unit	29.750.000	APBN	Analisa OPD
74	Pompa Air 4"	Buyung-Buyung	Karya Baru	1	Unit	29.750.000	APBN	Analisa OPD
75	Pompa Air 4"	Buyung-Buyung	Harapan Mandiri	1	Unit	29.750.000	APBN	Analisa OPD
76	Pompa Air 4"	Tabalar Muara	Bunga mekar I	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
77	Pompa Air 4"	Tabalar Muara	Bunga mekar II	1	Unit	29.590.000	APBN	Analisa OPD
78	Pompa Air 4"	Merancang Ilir	Melati	1	Unit	30.925.500	APBN	Analisa OPD
79	Pompa Air 3"	Tabalar Muara	Bunga mekar III	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
80	Pompa Air 3"	Tabalar Muara	Bunga mekar IV	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD



81	Pompa Air 3"	Bumi Jaya	Bumi Subur	1	Unit	11.520.000	APBN	Analisa OPD
82	Pompa Air 3"	Tanjung Perangat	Karya Makmur I	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
83	Pompa Air 3"	Tasuk	Padat Karya	1	Unit	11.520.000	APBN	Analisa OPD
84	Pompa Air 3"	Tasuk	Sumber Karya	1	Unit	11.520.000	APBN	Analisa OPD
85	Pompa Air 3"	Sambaliung	Sepakat	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
86	Pompa Air 3"	Tanjung Prangat	Harapan	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
87	Pompa Air 3"	Tanjung Prangat	Tunas makmur	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
88	Pompa Air 3"	Tasuk	Sumber Rejeki	2	Unit	24.024.000	APBN	Analisa OPD
89	Pompa Air 3"	Maluang	Bunyu Jaya	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
90	Pompa Air 3"	Merancang Ulu	Tunas Harapan	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
91	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Mawar	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
92	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Cahaya Indah	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
93	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Pada Elo	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
94	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Tajuk Sejahtera	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
95	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Pelangit Merancang	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
96	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Pada Idi	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
97	Pompa Air 3"	Melati Jaya	Gap. Bina Tani Mandiri	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
98	Pompa Air 3"	Sukan Tengah	Hortikultura Cinta Amanah	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
99	Pompa Air 3"	Sukan Tengah	Sumber Makmur	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
100	Pompa Air 3"	Bebanir Bangun	Mekar Sari II	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
101	Pompa Air 3"	Tasuk	Sumber Daya	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
102	Pompa Air 3"	Tasuk	Banua Indah	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
103	Pompa Air 3"	Merancang Ulu	Harapan Baru	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
104	Pompa Air 3"	Semurut	Bintang Timur 1	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
105	Pompa Air 3"	Semurut	Bintang Timur 2	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
106	Pompa Air 3"	Semurut	Terus Maju	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
107	Pompa Air 3"	Biatan Ilir	Mekar Sari	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
108	Pompa Air 3"	Biatan Ilir	Sejahtera Mandiri	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
109	Pompa Air 3"	Pilanjau	Saka Bulu 2	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD



110	Pompa Air 3"	Pilanjau	Berkah Tani Sejahtera	1	Unit	12.012.000	APBN	Analisa OPD
111	Pompa Air 3"	Sei Bebanir Bangun	Gapoktan Bangun Sejahtera	14	Unit	177.991.016	APBN	Analisa OPD
112	Pompa Air 3"	Sukan Tengah	Poktan Sumber Makmur	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
113	Pompa Air 3"	Tg Perengat	Poktan Harapan	3	Unit	38.140.932	APBN	Analisa OPD
114	Pompa Air 3"	Tg Perengat	Poktan Tanjung Rejo	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
115	Pompa Air 3"	Tg Perengat	Poktan Subur Makmur	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
116	Pompa Air 3"	Pilanjau	Poktan Saka Bulu 2	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
117	Pompa Air 3"	Pilanjau	Poktan Berkah Tani Sejahtera	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
118	Pompa Air 3"	Rantau Panjang	Poktan Sehati 1	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
119	Pompa Air 3"	Pegat Bukur	Poktan Batu Bual Jaya	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
120	Pompa Air 3"	Tasuk	Poktan Padat Karya	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
121	Pompa Air 3"	Tasuk	Poktan Sumber Karya	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
122	Pompa Air 3"	Tasuk	Poktan Sumber Daya	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
123	Pompa Air 3"	Tasuk	Poktan Banua Indah	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
124	Pompa Air 3"	Maluang	Poktan Bunyu Jaya	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
125	Pompa Air 3"	Merancang Ilir	Poktan Cahaya Mentari	5	Unit	63.568.220	APBN	Analisa OPD
126	Pompa Air 3"	Merancang Ulu	Poktan Harapan Baru	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
127	Pompa Air 3"	Merancang Ulu	Poktan Tunas Harapan	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
128	Pompa Air 3"	Merancang Ulu	Poktan Mattirowali	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
129	Pompa Air 3"	Melati Jaya	Poktan Handayani	1	Unit	12.713.644	APBN	Analisa OPD
130	Pompa Air 3"	Teluk Bayur	Poktan Harapan Makmur	2	Unit	25.427.288	APBN	Analisa OPD
131	Pompa Air 3"	Tabalar Muara	Gapoktan Kuala Jaya	14	Unit	177.991.016	APBN	Analisa OPD
132	Pompa Air 3"	Buyung Buyung	Gapoktan Jaya Maju	18	Unit	228.845.592	APBN	Analisa OPD
133	Pompa Air 3"	Biatan Ilir	Gapoktan Biatan Bersama	6	Unit	76.281.864	APBN	Analisa OPD



134	Combine Harvester Besar (Padi)	Buyung Buyung	Poktan Harapan Mandiri	1	Unit		APBN	Analisa OPD
-----	--------------------------------	---------------	------------------------	---	------	--	------	-------------

1.2. Kegiatan ***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub kegiatan : ***1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;***

**IK : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**

Kegiatan operasional dilaksanakan di Kantor UPT. Balai Benih Padi dan Hortikultura (BBPH) berlokasi di Kelurahan Gunung Tabur (jalan poros Kp. Birang) dan di Kp. Sei Bebanir Bangun. Kegiatan/tugas UPT salah satunya yaitu melaksanakan pengembangan perbenihan/perbibitan padi dan hortikultura, dan pembinaan kepada petani penangkar sebagai pengembang benih padi dan bibit hortikultura di Kabupaten Berau.

Pencapaian indikator tidak terlepas dari faktor pendukung berupa Ketersediaan air di persawahan karena lahan penangkar berada pada sawah pasang surut; dan telah terfasilitasi beberapa alat mesin pertanian sehingga memudahkan dalam pelaksanaan budidaya benih.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Permasalahan yang dihadapi UPT Balai Benih Padi dan Hortikultura melibatkan faktor internal seperti keterbatasan SDM dan sarana, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim, dukungan stakeholder, dan regulasi yang tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan kapasitas SDM, modernisasi fasilitas, kolaborasi dengan stakeholder, dan penguatan kebijakan pendukung.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, langkah-langkah strategis perlu diambil, termasuk penguatan SDM, modernisasi infrastruktur, peningkatan kolaborasi, serta inovasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pasar. Dengan implementasi yang tepat, target kinerja di masa mendatang dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sub kegiatan : ***2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman***

**IK : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**



Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan Hortikultura Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ditunjang dengan Kegiatan, yaitu :

- Pengembangan Jagung Hibrida seluas 338 Ha
- Pengembangan Padi Sawah seluas 285 Ha
- Pengembangan Cabe Keriting sebanyak 81 bungkus
- Pengembangan Cabe Besar sebanyak 60 bungkus
- Pengembangan Bawang Merah sebanyak 750 kg
- Pengadaan Pompa Air sebanyak 43 buah

Melalui Kegiatan ini diharapkan petani akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara terpadu dalam budidaya usaha taninya berdasarkan potensi lokasi/spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Berau.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Terbatasnya SDM petani baik itu minat maupun regenerasi lanjutan, karena sdm yang aktif mayoritas merupakan petani usia lanjut.
- Adanya alih fungsi lahan yang akan mengurangi luasan lahan berpotensi tanaman pangan dan hortikultura.
- Dalam hal pengadaan hibah barang khususnya pengembangan Cabe rawit untuk spesifikasi benih Cabe dimaksud dengan ketentuan yang ada di standar ssh benih yang dimaksud sudah tidak diproduksi lagi, sehingga tidak dilaksanakan.
- Terbatasnya sarana kendaraan operasional roda 4 untuk mobilisasi kegiatan lapangan.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Untuk keterbatasan SDM petani, akan selalu dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat.
- Untuk alih fungsi lahan akan dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada petani pemilik lahan/penggarap agar tetap melakukan kegiatan usaha tani dilahan yang masih memungkinkan di lakukan tanam tumpang sari
- Untuk belanja hibah yang tidak terealisasi akan dibuatkan usulan baru dengan spesifikasi yang sama namun produk benih dimaksud masih di produksi.
- Untuk operasional kendaraan roda 4 akan membuat usulan kepada pemerintah daerah demi kelancaran kegiatan.



**Hibah Sarana Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Benih Cabe Besar	Tumbit Dayak	Gapoktan Mufakat	10	bks	6.630.000	APBD II	
		Gurimbang	Tunggal Jaya	15	bks			
			Gurimbang Permai 2	10	bks			
			Berkat Usaha	10	bks			
		Sei Bebanir Bangun	Gapoktan Bangun Sejahtera	10	bks			
		Tanjung Perangat	Sumber Rezeki II	10	bks			
2	Benih Cabe Keriting	Tumbit Dayak	Gapoktan Mufakat	8	bks	5.702.400	APBD II	
		Gurimbang	Tunggal Jaya	8	bks			
			Gurimbang Permai2	12	bks			
			Berkat Usaha	12	bks			
		Sei Bebanir Bangun	Gapoktan Bangun Sejahtera	15	bks			
		Tanjung Perangat	Sumber Rezeki II	26	bks			
3	Benih Jagung Hibrida	Tanjung Batu	Naik Bersama	150	kg	310.791.000	APBD II	
		Tubaan	Gapok Tubaan Makmur	420	kg			
		Biatan Lempake	Biatan Tiga	375	kg			
			Suka Maju	375	kg			
			Biatan Satu	375	kg			
		Eka Sapta	Karya Utama	1125	kg			
		Sumber Mulia	Sri Rejeki I	1125	kg			
			Sri Mulyo	1125	kg			
		Tumbit Dayak	Gapoktan Mufakat	300	kg	269.925.000	APBD II	
		Timbit Melayu	Gapoktan Karya Bakti	900	kg			
		Buyung Buyung	Jaya Maju	450	kg			
		Harapan Maju	Maspul Rinjani	525	kg			
			Harapan	450	kg			
		Manunggal Jaya	Maju Bersama	375	kg			
Sumber Makmur	375		kg					



		Purnasari Jaya	Mekar Sari	450	kg			
		Suka Murya	Gunung Kandis	600	kg			
4	Benih Padi	Buyung-Buyung	Gapoktan Jaya Maju	5000	Kg	99.037.500	APBD II	
		Semurut	Gapoktan Mapadeleng	2125	kg			
5	Pompa Air	Gurimbang	Tunggal Jaya	5	buah	200.165.000	APBD II	
			Surojoyo	4	buah			
			Berkat Usaha	5	buah			
			Gurimbang Permai 2	5	buah			
			Gurimbang Permai 1	4	buah			
			Tri Tunggal	4	buah			
		Tanjung Perengat Tubaan	Sumber Rezeki II	4	buah			
			Berkah	4	buah			
			Loading Sejahtera	4	buah			
			Tubaan Jaya	4	buah			
6	Benih Bawang Merah	Gurimbang	Tunggal Jaya	750	kg	26.730.000	APBD II	
		Tubaan	Mandiri Sejahtera	1500	kg	65.100.000	APBD II	
7	Dok RoadMap Jagung			1	paket	197.579.000	APBD II	

Hibah yang tidak dapat dilaksanakan adalah Benih Cabe Rawit, hal ini dikarenakan spesifikasi dan merk dagang yang tercantum di SSH sudah tidak diproduksi lagi sehingga perlu pengusulan standar harga baru.

## 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Capaian indikator kinerja : **Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** persentase capaian tahun 2024 adalah 84,04% dari target 4.000Ha.

Kegiatan **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan : **Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

**IK : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan**

Sub Kegiatan ini berperan dalam menunjang keberhasilan program dimana lingkup kegiatannya mulai pra tanam sampai pasca panen usahatani, terutama dalam perlindungan tanaman pangan yang sangat kompleks dalam penanganannya. Fokus perlindungan tanaman



terutama tanaman pokok di Kabupaten Berau yaitu padi sawah dan jagung. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dominan menyerang lahan pertanian petani tahun 2024 masih seperti OPT pada tahun 2023 seperti Ulat Grayak Frugiperda (UGF) dan penggerek batang, pada tanaman jagung, hama putih palsu, wereng hijau (Vector Virus Tungro), walang sangit, penyakit blast, hawar pada tanaman padi sawah serta layu fusarium (pada bawang merah).

**Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Tersedianya Pestisida yang akan Dibantukan ke Petani
- Adanya Koordinasi yang Baik dengan POPT dan PPL
- Hasil monitoring ke lapangan tingkat serangan OPT masih rendah
- Adanya kegiatan SLPHT/PPHP dari anggaran Bankeu Tahun 2024 tersedia 3 kelas di Kab. Berau

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Jenis pestisida yang ada kurang lengkap untuk mengatasi OPT tertentu (bakteri/virus)
- Balai Proteksi Kaltim belum mengadakan kegiatan gerdal ke Kab. Berau untuk serangan OPT yang sifatnya masif
- Tidak adanya bantuan pestisida dari Propinsi maupun Pusat untuk Buffer Stock di tingkat Kabupaten
- Buffer Stock pestisida di Gudang Kabupaten sangat menipis

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Pengadaan pestisida yang sesuai dengan trend OPT yang sering menyerang dan endemis di Kabupaten Berau
- Koordinasi dengan Balai Proteksi Kaltim secara sinergi untuk mengatasi serangan OPT yang sifatnya masif
- Menempatkan kegiatan SLPHT/PPHP di wilayah sentra produksi yang endemis OPT dan masih minim pengendaliannya
- Tahun 2025 harus diusulkan pengadaan pestisida untuk Buffer Stock Kabupaten
- Pengadaan Pembenh Tanah/Pupuk Hayati setiap tahun, akan meminimalisir dampak serangan penyakit pada tanaman khususnya dari golongan jamur dan bakteri.



## Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan

**Tabel 21**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024**

PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peternakan</b>					
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)</b>	<b>Produksi Daging Sapi</b>	<b>ton</b>	<b>479,47</b>	<b>483,91</b>	<b>100,93</b>
	<b>Produksi Telur Ayam Ras</b>	<b>ton</b>	<b>1973,02</b>	<b>1492,81</b>	<b>75,66</b>
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDG Hewan	ekor	950	365	38,42
Sub Keg. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	laporan	12	10	83,33
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada peternak	peternak dan kelompok	15	15	100
Sub Keg. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	28.800	29.575,8	102,69
Sub Keg. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Laporan	36	36	100



PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Peningkatan Pemanfaatan RPH</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian/Peternakan	Terlaksananya Pelayanan Pemotongan pada Rumah Potong Hewan yang Beroperasi dan Pemenuhan Kebutuhannya	Ekor	1.402.300	1.249.158	89,08
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	Unit	1	1	100
<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b>	<b>%</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>
	<b>Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas</b>	<b>%</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>100</b>
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Vaksinasi Ternak dan HPR	ekor	4.000	3.488	87,2
Sub Keg. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan	laporan	65	68	104,62



<b>PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>					
<b>Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten dan 6 Puskesmas	kali	9000	9927	110,3
Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	84	84	100
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pelaku usaha	sampel	275	308	112
Sub Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	24	24	100
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi (Peternakan)</b>	<b>Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>75</b>
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis) Usaha Peternakan	Orang	20	15	75
Sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	20	15	75



Pada sasaran 2 jumlah program pendukung yaitu 4 program terdiri dari 7 Kegiatan dan 8 sub kegiatan.

**Program dengan Capaian Indikator Kinerja 100% (2 Program)**

**1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)**

Capaian indikator kinerja : **Peningkatan Pemanfaatan RPH** persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah realisasi 1 unit RPH.

Kegiatan **Pembangunan Prasarana Pertanian/Peternakan**

Sub kegiatan : **Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan**

**IK : Jumlah RPH yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi**

Kegiatan operasional dilaksanakan di Kantor UPT. Rumah Potong Hewan berlokasi di Kec. Gunung Tabur. UPT. Rumah Potong Hewan (RPH) Gunung Tabur selain bertugas memberikan pelayanan pemotongan ternak baik ternak ruminansia maupun ternak unggas untuk pemenuhan daging yang ASUH, RPH juga bertugas mendukung pengendalian pemotongan ternak (ruminansia) betina produktif.

Capaian indikator kinerja UPT RPH Gunung Tabur belum berhasil mencapai target pelayanan pemotongan ternak ruminansia dan ternak unggas. Hal lain yang perlu diinformasikan bahwa selain target pelayanan pemotongan ternak, UPT RPH juga ditargetkan untuk dapat memberikan sumbangan PAD dari retribusi pelayanan pemotongan hewan sebesar Rp. 222.850.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). UPT RPH di tahun 2024 hingga 12 Desember 2024 telah berhasil memberikan sumbangan PAD dari retribusi pelayanan sebesar Rp. 263.313.500,- (Dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

**Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Komunikasi dan koordinasi dengan staf dan pelaku usaha pemotongan hewan telah terjalin baik
- Koordinasi antar OPD terutama Kementerian Agama Kab. Berau cukup baik dalam upaya pengurusan sertifikasi halal RPH
- Dukungan positif dari Pemerintah Daerah



**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Kegagalan pencapaian kinerja dari UPT RPH adalah penetapan target yang terlalu tinggi. Penetapan target tersebut kemungkinan ditetapkan berdasarkan data populasi ternak baik ternak sapi maupun ternak unggas. Data pemotongan ternak ruminansia sejak tahun 2020 selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan. Data pemotongan ternak ruminansia pun dari tahun ke tahun cenderung menurun, sementara target pemotongan ternak ruminansia selalu meningkat. Kondisi serupa juga terjadi di pelayanan pemotongan ternak unggas walaupun lebih baik jika dibandingkan pemotongan ternak ruminansia.
- Permasalahan utama yang dihadapi oleh UPT RPH Gunung Tabur adalah Sertifikat Halal yang belum dimiliki oleh UPT RPH Gunung Tabur. Ketiadaan sertifikat halal RPH memang tidak berpengaruh secara langsung dengan capaian kinerja UPT RPH Gunung Tabur. Ketiadaan sertifikat halal RPH mempunyai pengaruh atas produk asal hewan yang dihasilkan oleh UPT RPH, karena produk tersebut tidak dapat diberikan label halal. Sertifikasi halal RPH belum dapat dilakukan disebabkan oleh personel UPT RPH yang masih belum memenuhi persyaratan minimal untuk diterbitkannya Sertifikat Halal.
- UPT RPH Gunung Tabur selain belum memiliki Sertifikat Halal, UPT RPH juga belum memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sertifikat NKV diterbitkan berdasarkan kepada penilaian kondisi bangunan tempat pemotongan yang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tempat Pemotongan Hewan Ruminansia dan SNI Tempat Pemotongan Unggas.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- UPT RPH Gunung Tabur telah mengajukan permohonan Sertifikasi Halal RPH, tetapi permohonan tersebut karena personel yang ditunjuk sebagai Juru Sembelih Halal dan Penyelia Halal masih belum memenuhi persyaratan. Tindak lanjut atas kondisi tersebut, UPT RPH melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau untuk mengajukan peminjaman tenaga Juru Sembelih Halal yang telah mendapatkan pelatihan dari MUI Kab. Berau. Koordinasi juga dilakukan UPT RPH dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Berau untuk mendapatkan ijin peminjaman staf Kemenag agar dapat menjadi Penyelia Halal RPH. Seluruh upaya tersebut diharapkan akan dapat melengkapi persyaratan Sertifikasi Halal RPH.
- Upaya UPT RPH untuk memperoleh Sertifikat NKV dimulai dengan melakukan penyusunan Kajian Penataan Lingkungan RPH sehingga pembenahan bangunan dan lingkungan UPT RPH dapat lebih jelas dan terarah. Kajian penataan lingkungan RPH tersebut dilakukan oleh tenaga ahli di Universitas Mulawarman, Samarinda.



## 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Capaian indikator kinerja : **1. Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)** persentase capaian tahun 2024 adalah 100% dengan jumlah realisasi 10 persen; **2. Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas** persentase capaian tahun 2023 adalah 100% dengan jumlah realisasi 1,2 persen.

### 1.1. Kegiatan **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan : **Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**IK : Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 daerah kabupaten/kota serta menjaga status kesehatan hewan dalam suatu wilayah. Wilayah yang bebas akan penyakit hewan menular harus dipertahankan dengan menjaga dan mengawasi lalu lintas keluar masuk hewan/karantina, vaksinasi dan surveilans penyakit hewan/ternak. Dalam suatu usaha peternakan terutama peternakan rakyat perlu adanya kontrol terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ternak peliharaan sehingga didapatkan data kejadian penyakit ternak agar setiap ternak yang terlihat kurang sehat dapat segera ditangani dan bila ada ternak yang menderita penyakit-penyakit menular ataupun zoonosis dapat segera ditanggulangi.

#### **Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Partisipasi pro aktif dari peternak, masyarakat, serta aparat kampung untuk melakukan pencegahan PHMSZ di kampung masing-masing
- Dukungan penuh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang terhadap program pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis
- Partisipasi pro aktif Kepala, Kasubbag TU, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Petugas di 6 Kecamatan



**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Disamping ada masyarakat yang aktif, ada pula masyarakat yang kurang aktif dalam merespon kegiatan vaksinasi yang dilakukan terutama vaksinasi Rabies.
- Cuaca yang tidak menentu menjadi salah permasalahan, dikarenakan kegiatan vaksinasi dan surveilans merupakan kegiatan lingkungan luar (lapangan) sehingga cuaca sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Optimalisasi kegiatan Vaksinasi Rabies, JD, PMK, dan SE di seluruh Kampung di Kabupaten Berau dengan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya
- Optimalisasi kegiatan Survaillance terutama pada ternak atau HPR yang masih belum jelas status vaksinasinya
- Optimalisasi dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran operasional ke Lapangan
- Tahun 2025 Bidang Kesehatan Hewan dan kesmavet mendapatkan tambahan SDM dari rekrutmen CPNS 2024 yaitu 2 orang Medik Veteriner dan 2 orang Paramedik Veteriner, sehingga dengan penambahan SDM pelaksanaan kegiatan dapat menjadi lebih optimal.

1.2. Kegiatan ***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub kegiatan : ***Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner***

**IK : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner**

Kesehatan hewan merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kegiatan usaha peternakan. Hewan yang sehat akan menghasilkan produksi yang maksimal, oleh karena itu kesehatan hewan harus terus dipelihara dan menjadi salah satu prioritas dalam suatu usaha peternakan. Disamping itu dalam suatu usaha peternakan perlu adanya kontrol terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ternak peliharaan sehingga didapatkan data kejadian penyakit ternak agar setiap ternak yang terlihat kurang sehat dapat segera ditangani dan bila ada ternak yang menderita penyakit-penyakit menular ataupun zoonosis dapat segera ditanggulangi. Untuk itu perlu adanya sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa Pelayanan Kesehatan Hewan pada Hewan/Ternak.

Saat ini terdapat 6 (enam) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan 1 (satu) unit pelayanan (Vet Corner/Klinik Hewan Dinas). UPT Puskeswan dimaksud antara lain UPT Puskeswan Segah (mengampu Kec. Kelay dan Segah), UPT Puskeswan Gunung Tabur (mengampu Kec. Gunung Tabur, Pulau Derawan, Pulau Maratua), UPT Puskeswan Sambaliung (mengampu Kec.



Sambaliung dan Tanjung Redeb), UPT Puskesmas Biatan (mengampu Kec. Biatan dan Tabalar), UPT Puskesmas Talisayan (mengampu Kec. Talisayan) dan UPT Puskesmas Batu Putih (mengampu Kec. Batu Putih dan Biduk biduk). Sedangkan Vet Corner adalah unit Pelayanan Kesehatan Hewan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau.

**Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Adanya dana yang tersedia di setiap triwulan;
- Adanya sarana transportasi menuju lokasi kegiatan (Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengobatan/Vaksinasi Massal Ternak);
- Petugas Peternakan di Lokasi dan Peternak bersama-sama mengumpulkan ternak di titik kumpul, sehingga pelayanan mudah dan cepat;
- Peternak aktif menghubungi Petugas apabila ada ternak yang sakit;
- Peternak/kelompok ternak melaporkan perkembangan ternaknya kepada Petugas.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur, tapi tidak sampai mewabah luas di wilayah Kab. Berau. Anggaran untuk pencegahan/kewaspadaan dari APBD sangat minim.
- Untuk peningkatan SDM Petugas via Daring terkendala jaringan di lokasi yang lambat, karena perlu jaringan 4G atau 3G.
- Topografi Kabupaten Berau yang Beragam berupa rawa dan bukit dan jauhnya lokasi ternak masyarakat.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Meningkatkan Koordinasi berupa Rapat Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan Rapat strategi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pencapaian target kinerja;
- Meningkatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas
- Mengusulkan pembukaan formasi kebutuhan SDM Medik Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk ditempatkan di UPT Pusat Kesehatan Hewan
- Melaksanakan upaya pencegahan masuknya PMK ke Kab. Berau melalui vaksinasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada Masyarakat;
- Selalu mengusulkan ke BKD untuk formasi Medik dan Paramedik Veteriner sesuai Analisa Jabatan yang telah disusun;
- Meminta kepada pihak ketiga/rekanan agar segera melakukan pemesanan obat hewan kepada penyedia;



- Untuk perencanaan program berikutnya agar selalu meng-*update* dan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- Dalam pengelolaan kegiatan perlu kerjasama, keterbukaan, ketelitian dan saling mengingatkan.

### 1.3. Kegiatan ***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***

Sub kegiatan : ***Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan***

#### **IK : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan**

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mempunyai komitmen untuk menyediakan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Masalah ASUH yang terkait dengan sistem penyediaan pangan antara lain higiene sanitasi, tidak ada pengawasan dan pemeriksaan yang konsisten (misalnya pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging di RPH), belum adanya penegakan hukum, serta belum adanya sistem Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertanggung jawab terhadap keamanan, kesehatan dan kelayakan pangan asal hewan.

Sampel produk asal hewan diambil di tingkat peternak, dan penjual produk asal hewan (daging sapi, daging ayam, telur, bakso, sosis dan lain-lain), di penggilingan maupun di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Berau untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Samarinda. Tujuan diambilnya sampel adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit zoonosa, serta memberikan jaminan ketenteraman batin bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Produk Asal Hewan (PAH) adalah produk yang mudah rusak (*perishable food*). Hal ini disebabkan produk panga asal hewan seperti daging, telur dan susu sangat mudah tercemar oleh bakteri apabila proses pengolahan dan penyimpanannya tidak benar. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan keamanan dan peredaran pangan asal hewan, serta memastikan seluruh produk yang beredar telah diproses, didistribusikan dan dipasarkan di fasilitas unit usaha yang terdaftar dan diakui oleh otoritas berwenang setempat.



**Faktor Pendukung Capaian Kinerja :**

- Kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam hal ini UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet Samarinda, Balai Veteriner Banjarbaru dan tenaga administrasi
- Komponen dari Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang Terlibat
- Adanya Pertambahan Anggaran Setiap Tahun Anggaran
- Komitmen untuk dapat menyelesaikan Kegiatan dan Pengembangan dengan baik dan tepat waktu
- Sarana dan Prasarana yang memadai
- Bertambahnya Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan seperti Penggilingan Bakso/Daging, Penjual Bakso, Penjual Ayam, Budidaya Ternak, Usaha Distribusi/Ritel (Gudang pendingin, Kios Daging, Unit Pendingin dll)
- Adanya Tingkat pertumbuhan Ekonomi hal ini dapat dilihat dari peningkatan penyembelihan hewan qurban setiap tahunnya.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga dokter Hewan yang menangani Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Belum adanya SDM yang terlatih dalam Pengambilan Sampel Pangan Asal Hewan
- Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha untuk mengurus sertifikat halal dan NKV
- Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha dalam memperhatikan Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh dan Halal).

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Perlunya Tenaga Dokter Hewan terlatih untuk menangani Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- Perlu adanya Diklat bagi SDM yang melakukan Pengambilan Sampel Pangan Asal Hewan
- Dilakukan sosialisasi dan pembinaan pada pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal dan NKV
- Dilakukan pembinaan-pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pelaku usaha akan bahaya penggunaan bahan berbahaya pada Produk Pangan Asal Hewan.



## **Program dengan Capaian Indikator Kinerja <100% (2 Program)**

### **1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)**

Capaian indikator kinerja : **Produksi Daging Sapi** persentase capaian tahun 2024 adalah 100,93% dengan jumlah realisasi 483,91 ton; **Produksi Telur Ayam Ras** persentase capaian tahun 2024 adalah 75,66% dengan jumlah realisasi 1492,81 ton.

#### **1.1 Kegiatan *Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub kegiatan : **Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman**

#### **IK : Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian**

Kabupaten Berau menjadi sektor strategis dalam dunia usaha pangan khususnya dalam bidang peternakan. Meskipun termasuk kota kecil akan tetapi Kabupaten Berau merupakan kota industri yang mempunyai penduduk padat dengan tingkat konsumsi daging yang lumayan tinggi. Menurut data jumlah pemotongan ternak sapi di Kabupaten Berau rata-rata per tahun sekitar 3.000 ekor. Skala usaha peternakan yang dilakukan oleh peternakan rakyat belum mencapai skala ekonomi. Pengembangan kawasan juga belum maksimal masih banyak lahan-lahan kritis dan kawasan sentra peternakan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Serta bibit Ternak yang dihasilkan merupakan bibit ternak yang kurang berkualitas karena adanya perkawinan sedarah atau *inbreeding*. Apabila tidak ada pemasukan ternak potong dari luar daerah, diprediksi 3-4 tahun ke depan ternak lokal akan habis.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui Sub Kegiatan Penjaminan dan Kemurnian Kelestarian SDG Hewan untuk meningkatkan produksi peternakan mulai dari pemberian bantuan hibah ternak dan sarana prasarana pendukungnya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat/ petani.

Populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak sapi. Pada Tahun 2023 populasi sapi sebanyak 12.237 ekor turun menjadi 11.960 ekor. Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau didukung dari anggaran APBD II Kabupaten Berau untuk pembelian alat dan bahan Inseminasi Buatan, Pengadaan N2 Cair, Pembelian hormon dan vitamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya.



**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas Inseminator untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB.
- Kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.
- Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang dilaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.
- Masih kurangnya jumlah petugas inseminator di lapangan, sehingga diperlukan adanya penambahan petugas inseminator.
- Lambatnya pengiriman N2 cair dari samator sehingga mengakibatkan pendistribusian N2 cair dan straw ke depo di UPT Puskeswan jadi terlambat juga.
- Sistem pemeliharaan ternak didominasi oleh ekstensif sehingga optimalisasi reproduksi kurang maksimal.
- Adanya ancaman wabah penyakit PMK yang dapat mempengaruhi masa birahi pada ternak.
- Tingginya pemotongan ternak betina produktif.
- Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak sehingga dapat berpengaruh terhadap siklus birahi ternak.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal.
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotivasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS dan IDENTIK PKH.



- Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan Petugas Inseminator, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Gangrep.
- Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Inseminasi Buatan, maka diupayakan peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas inseminator berupa bahan dan alat IB, kendaraan operasional dan biaya operasional melalui anggaran APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.

**Hibah Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bibit Ternak Kambing	Sukan	KT. Setia Bersama	27	Ekor	93.960.000	APBD II	Pokir
2.	Bibit Ternak Kambing	Tubaan	KT. Mandiri Sejahtera	44	Ekor	152.320.000	APBD II	Pokir
3.	Bibit Ternak Kambing	Dumaring	KT. Muara Bakil	27	Ekor	93.960.000	APBD II	Usulan OPD
4.	Bibit Ternak Kambing	Eka Sapta	KT. Karya Utama	21	Ekor	74.100.000	APBD-P II	Pokir
5.	Bibit Ternak Kambing	Bukit Makmur Jaya	KT. Tani Makmur	21	Ekor	74.100.000	APBD-P II	Pokir
6.	Bibit Ternak Kambing	Long Lanuk	KT. Lestari Nyapa Indah	21	Ekor	74.100.000	APBD-P II	Pokir
7.	Bibit Ternak Kambing	Teluk Bayur	KT. Ladang Sari	32	Ekor	113.700.000	APBD-P II	Pokir
8.	Bibit Ternak Kambing	Melati Jaya	KT. Margo Mulyo	50	Ekor	196.200.000	APBD-P II	Pokir
9.	Bibit Ternak Kambing	Labanan Makarti	KT. Berkah Al An'am	30	Ekor	106.800.000	APBD-P II	Pokir
10.	Bibit Ternak Kambing	Labanan Makarti	KT. Pandawa Makarti	80	Ekor	285.900.000	APBD-P II	Pokir
11.	Bibit Ternak Kambing	Teluk Bayur	KT. Kumala	21	Ekor	74.100.000	APBD-P II	Pokir



<b>1.2 Kegiatan <i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></b>								
Sub kegiatan : <b>1. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan</b>								
<b>IK : Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</b>								
<p>UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak merupakan bagian dari organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau terbentuk berdasarkan Perbub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak.</p> <p>Tidak ada peningkatan realisasi bibit sapi yang dihasilkan antara tahun 2023 dan tahun 2024, sedangkan untuk luasan tanam hijauan pakan ternak tetap dengan luas 2,5 Ha karna masih fokus pada pemeliharaan dan perbaikan tanaman hpt yang ada. Pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan dilaksanakan dengan luas areal sekitar 2,5 Ha dan penanaman hijauan pakan ternak akan dilaksanakan pada tahun 2025 secara bertahap.</p>								
<b>Permasalahan yang Dihadapi :</b>								
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kekurangan sumber daya manusia, di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pegawai yang ada saat ini berjumlah 4 orang, 1 orang PNS sebagai Kasubag TU dan 3 orang perawat ternak, jumlah yang jauh dari ideal untuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam mencapai tujuan utama peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.</li></ul>								
<b>Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :</b>								
<ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan anggaran upah buruh swakelola pertanian untuk pemeliharaan ternak dan pemeliharaan tanaman HPT serta perluasan areal tanam hijauan pakan ternak.</li><li>- Pengadaan pegawai teknis peternakan seperti Paramedic veteriner, Pengawas mutu bibit ternak, pengawas mutu pakan serta pegawai administrasi perkantoran.</li><li>- Penambahan jumlah sapi indukan produktif serta optimalisasi Inseminasi Buatan pada ternak sapi yang ada di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.</li><li>- Penganggaran yang tepat sesuai kebutuhan dan optimalisasi realisasi anggaran.</li><li>- Perluasan areal tanam Hijauan Pakan ternak/Bank Pakan untuk menjamin ketersediaan pakan ternak di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Dengan adanya Bank Pakan dapat mengurangi beban kerja perawat ternak.</li></ul>								



Sub kegiatan : **2. Pengendalian Penyediaan benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

**IK : Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Berau akan protein hewani sebagaimana visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau yang mengupayakan terwujudnya sentra-sentra produksi pertanian dan peternakan yang berbasis teknologi dan berorientasi pasar, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau melalui Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak menyiapkan pembinaan di kelompok-kelompok tani/ternak dengan pemanfaatan dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Berau.

**Permasalahan yang Dihadapi :**

- Menurunnya jumlah populasi ternak sapi, dari angka 12.187 ekor pada tahun 2023 menjadi 11.948 ekor pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya menurunnya minat masyarakat untuk beternak, berkurangnya peluang pasar karena membanjirnya produk-produk daging impor frozen yang lebih murah harganya menyebabkan pasar hewan ternak menurun peminatnya.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Dalam rangka meminimalkan resiko kegagalan atau kurangnya capaian kinerja program, maka sebaiknya kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis ke peternak lebih ditingkatkan.

**Hibah Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Chopper Rumput	Kampung Samburakat Kec. Gunung Tabur	KT Sumber Tani Makmur	1	Unit	26.250.000	APBD II	Usulan OPD
2.	Chopper Rumput	Kampung Bukit Makmur Jaya, Kec. Biatan	KT Sari Makmur	1	Unit	26.250.000	APBD II	Usulan OPD
3.	Mesin Pengaduk Pakan (Mixer)	Kampung Labanan Makarti	KT Makarti Sukses	1	Unit	48.674.300	APBD-P II	Pokir Bupati Berau



		Kec. Teluk Bayur						
4.	Mesin Pengereng Pakan (Rptary Dryer)	Kampung Labanan Makarti Kec. Teluk Bayur	KT Makarti Sukses	1	Unit	58.500.000	APBD-P II	Pokir Bupati Berau
5.	Mesin Chopper Rumput	Kampung Tubaan, Kec. Tabalar	KT Mandiri Sejahtera	1	Unit	19.500.000	APBD-P II	Pokir

## 2. Program Perizinan Usaha Pertanian

Capaian indikator kinerja : **Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi (Peternakan)** persentase capaian tahun 2024 adalah 75% dengan jumlah realisasi 15 Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha.

Kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan : **Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian**

**IK : Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi**

Sub kegiatan berfokus pada peningkatan produksi hasil peternakan melalui sosialisasi Tanda Daftar Peternakan rakyat (TDPR) yang merupakan salah satu syarat dalam menanggulangi pembiayaan usaha di bidang peternakan melalui Kredit Ternak Sejahtera (KTS) bekerjasama dengan pihak perbankan, mendorong kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang akan memberikan jaminan perlindungan dari resiko kematian ternak sapi yang dialami petrnak akibat kematian karena penyakit, kematian karena kecelakaan, kematian karena melahirkan dan adanya kehilangan akibat kecurian, sehingga dapat mengatasi sebagian kerugian usaha.

### Faktor Pendukung Capaian Kinerja :

- Peluang bisnis usaha di bidang peternakan masih terbuka
- Potensi pasar usaha bidang peternakan masih terbuka.
- Tersedianya beberapa fasilitas pembiayaan di bidang peternakan seperti kredit lunak usaha di bidang peternakan seperti KTS dan KUR bidang peternakan.

### Permasalahan yang Dihadapi :

- Minat usaha di bidang peternakan masih rendah
- Resiko usaha di bidang peternakan relatif tinggi.



- Sumber Daya Manusia di bidang peternakan masih kurang akibat regenerasi SDM di Bidang peternakan masih rendah.

**Upaya Perbaikan pada Tahun Berikutnya :**

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha bidang peternakan dalam mengembangkan usahanya.
- Mengadakan pembinaan dan sosialisasi terkait pembiayaan usaha peternakan dan penerapan inovasi dan teknologi di bidang peternakan.

**Hibah Tahun 2024 yang Terlaksana :**

No	Jenis Hibah	Kampung	Kelompok Tani Penerima	Volume	Satuan	Realisasi Anggaran	Sumber Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dukungan Sumber Dana selain APBD II</b>								
1.	Bibit Sapi	Kasai Kec. Pl. Derawan	KT Kartika Bersama Jaya	13	Ekor		APBD I	Pokir
		Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	KT Bantau Mandiri	20	Ekor		APBD I	Aspirasi APBD I
		Suaran Kec. Sambaliung	KT Sepakat Jaya	20	Ekor		APBD I	Aspirasi APBD I
		Samburakat Kec. Gunung Tabur	KT Rejeki Subur	50	Ekor		APBD I	APBD I Murni
		Samburakat Kec. Gunung Tabur	KT Samburakat Jaya Mandiri	50	Ekor		APBD I	APBD I Murni
2	Bibit Kambing	Mangkajang Kec. Sambaliung	KT Bersama Sejahtera	35	Ekor		APBD I	Aspirasi APBD I

**D. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil analisa dijabarkan sebagai berikut:



## 1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

**Tabel 22**  
**Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Rp 9.768.368.000	Rp 8.396.648.208	85,96
		Produktivitas Jagung			
		Produktivitas Cabe (Besar, Keriting dan Rawit)			
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Rp 6.217.358.336	Rp 5.456.590.630	87,76
		Produksi Telur Ayam Ras			

### Analisis :

Dua sasaran strategis menunjukkan persentase capaian anggaran tidak maksimal yaitu kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan program/ kegiatan/ sub kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, pencapaian indikator kinerjanya tidak dapat terealisasi maksimal sehingga mempengaruhi penggunaan anggaran. Secara rinci telah dibahas pada BAB III poin C.4.

## 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

**Tabel 23**  
**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024**



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>24.008.710.578</b>	<b>21.581.786.757</b>	<b>89,89</b>	<b>&lt; 100 %</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>393.079.500</b>	<b>308.512.000</b>	<b>78,49</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.880.000	105.298.200	85,69	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.999.500	5.642.000	56,42	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	260.200.000	151.330.600	75,93	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.266.612.778</b>	<b>18.362.565.427</b>	<b>90,61</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.066.312.778	18.162.265.427	90,51	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	200.300.000	200.300.000	100	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>95.000.000</b>	<b>55.628.318</b>	<b>58,56</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.000.000	55.628.318	58,56	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>805.633.900</b>	<b>765.972.618</b>	<b>95,08</b>	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.934.000	14.250.000	95,42	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	458.272.300	443.607.895	96,80	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.927.800	3.610.000	91,91	
	Penyediaan bahan logistik kantor	66.500.000	62.334.000	93,74	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	6.610.000	44,07	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000	4.860.000	69,43	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240.000.000	230.700.723	96,13	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.110.150.400</b>	<b>1.006.800.000</b>	<b>90,69</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.110.150.400	1.006.800.000	90,69	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.043.444.000</b>	<b>835.038.125</b>	<b>80,03</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.198.000	1.570.000	71,43	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	301.050.000	257.081.749	85,40	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	740.196.000	576.386.376	77,87	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>294.790.000</b>	<b>247.270.269</b>	<b>83,88</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2605.000.000	224.576.769	86,38	
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	9.790.000	6.830.000	69,77	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000	15.863.500	63,45	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>9.915.206.600</b>	<b>8.654.565.874</b>	<b>87,29</b>	<b>&lt; 100 %</b>
	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>3.361.488.600</b>	<b>3.137.306.678</b>	<b>93,33</b>	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.361.488.600	3.137.306.678	93,33	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>5.683.724.700</b>	<b>4.742.978.269</b>	<b>83,45</b>	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.346.911.600	1.201.528.827	89,21	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.776.814.000	1.489.355.574	83,82	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	2.559.999.100	2.052.093.868	80,16	
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>869.993.300</b>	<b>774.280.927</b>	<b>88,99</b>	
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	519.206.400	476.651.872	91,80	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	350.786.900	297.629.055	84,85	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>2.363.423.500</b>	<b>2.079.103.334</b>	<b>87,97</b>	< 100%
	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>69.996.000</b>	<b>47.778.832</b>	<b>68,26</b>	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	69.996.000	47.778.832	68,26	
	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.293.427.500</b>	<b>2.031.324.502</b>	<b>88,57</b>	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	215.999.500	195.314.993	90,42	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	174.999.500	160.070.000	91,47	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	393.999.700	292.825.034	74,32	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	296.498.500	244.945.748	82,61	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.211.930.300	1.138.168.727	93,91	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.420.436.636</b>	<b>1.341.788.398</b>	<b>94,46</b>	< 100%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>316.977.500</b>	<b>305.370.536</b>	<b>96,34</b>	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	316.977.500	305.370.536	96,34	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>913.630.136</b>	<b>856.807.501</b>	<b>93,78</b>	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	913.630.136	856.807.501	93,78	
	<b>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>189.829.000</b>	<b>179.610.361</b>	<b>94,62</b>	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	189.829.000	179.610.361	94,62	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>332.898.000</b>	<b>244.783.488</b>	<b>73,53</b>	< 100%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>332.898.000</b>	<b>244.783.488</b>	<b>73,53</b>	
	Pengndalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	332.898.000	244.783.488	73,53	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>334.362.000</b>	<b>240.703.076</b>	<b>71,99</b>	< 100%
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>334.362.000</b>	<b>240.703.076</b>	<b>71,99</b>	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	179.363.000	90.444.366	50,43	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	154.999.000	150.258.710	96,94	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PPENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.619.399.600</b>	<b>1.292.294.668</b>	<b>79,80</b>	< 100%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.619.399.600</b>	<b>1.292.294.668</b>	<b>79,80</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	831.540.000	734.512.048	88,33	



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	365.359.600	274.320.320	75,08	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	422.500.000	283.462.300	67,09	
	<b>Total</b>	<b>39.994.436.914</b>	<b>35.435.025.595</b>	<b>88,60</b>	

Analisis :

Tujuh program menunjukkan persentase capaian anggaran tidak maksimal yaitu kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan ada kegiatan/ sub kegiatan pendukung program tersebut, pencapaian indikator kinerjanya tidak dapat terealisasi maksimal sehingga mempengaruhi penggunaan anggaran. Secara rinci telah dibahas pada BAB III poin C.6.

A close-up photograph of several brown eggs in a woven basket. The eggs are the central focus, with some in sharp focus and others slightly blurred in the background. The basket's texture is visible on the left side.

# **Bab IV**

# **Penutup**

- 1. Simpulan***
- 2. Upaya Tahun Mendatang***



## A. Simpulan

1. Sasaran I (Meningkatnya Produksi Pertanian) capaian kinerja belum maksimal dengan realisasi indikator kinerja Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang) 3,40 ton/ha (100,89%) dari target 3,37 ton/ha, Produktivitas Jagung 5,55 ton/ha (94,87%) dari target 5,85 ton/ha, dan Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit) 3,67 ton/ha (91,29%) dari target 4,02 ton/ha dengan capaian anggaran sasaran strategis Rp 8.396.648.208 (85,96%).
2. Sasaran II (Meningkatnya Produksi Peternakan) capaian kinerja belum maksimal dengan realisasi indikator kinerja Produksi Daging Sapi 483,91 ton (100,93%) dari target 479,47 ton, dan Produksi Telur Ayam 1.492,81 ton (75,66%) dari target 1.973,02 ton dengan capaian anggaran sasaran strategis Rp 5.456.590.630 (87,76%).

## B. Upaya Tahun Mendatang

1. Sasaran I
  - Pengadaan benih Jagung, Padi, Cabe dan Bawang merah
  - Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
  - Gerakan pengendalian (gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis budidaya dan pasca panen bagi petani.
  - Peningkatan kualitas SDM bagi petani dan petugas melalui kegiatan pembelajaran
  - Usulan proposal hibah sebelum tahun berjalan harus sudah siap dan didisposisi Bupati
  - Perencanaan kegiatan dengan baik
  - Koordinasi dengan penyedia barang di awal tahun
2. Sasaran II
  - Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi ternak sapi maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan, oleh karena itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang



difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.

- Memberikan akses kemudahan dalam hal pelayanan terhadap pelaku usaha termasuk pemberian ijin usaha peternakan seperti rekomendasi dan lainnya dari pimpinan.
- Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya ke tingkat petani/peternak dalam hal peningkatan produksi peternakan.
- Melaksanakan pembinaan-pembinaan dan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pelaku usaha akan bahaya penggunaan bahan berbahaya pada Produk Pangan Asal Hewan serta pengurusan sertifikasi halal dan NKV.
- Optimalisasi dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran operasional ke Lapangan.
- Meningkatkan Koordinasi berupa Rapat Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan Rapat strategi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pencapaian target kinerja.
- Mengusulkan pembukaan formasi kebutuhan SDM Medik Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner untuk ditempatkan di UPT Pusat Kesehatan Hewan.



# Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024 dan 2025**
- 2. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2024**
- 3. Pengukuran Kinerja Tahunan/Rencana Aksi 2024**
- 4. LHE AKIP Inspektorat Kab. Berau**
- 5. Matrik Rencana Strategis (Renstra)**
- 6. Matrik IKU**
- 7. Pohon Kinerja dan Cascading 2024**
- 8. Crosscutting**
- 9. SK Tim**
- 10. SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja**



## **lampiran-lampiran**

1. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2024 dan 2025  
(PK Eselon III, IV dan staf lampiran terpisah)
2. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahunan/Rencana Aksi 2024
4. LHE AKIP Inspektorat Kab. Berau
5. Matrik Rencana Strategis
6. Matrik IKU (Indikator Kinerja Utama)
7. Pohon Kinerja dan Cascading 2024
8. Crosscutting
9. SK Tim SAKIP 2024
10. SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Junaidi, S.Pt**

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd**

Jabatan : Bupati Berau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd

  
Junaidi, S.Pt  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681022 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DINAS TANAMANA PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (padi Sawah dan Ladang)	3,37 ton/ha
		Produktivitas Jagung	5,85 ton/ha
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	4,02 ton/ha
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	479,47 ton
		Produksi Telur Ayam Ras	1,973,02 ton

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7.065.487.300	APBD II
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.616.744.600	APBD II
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.233.830.136	APBD II
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 332.898.000	APBD II
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 319.412.400	APBD II
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.431.540.000	APBD II
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.179.433.978	APBD II
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 32.179.346.414</b>	

Tanjung Redeb, 2 Januari 2024

Bupati Berau,

Kepala Dinas,

  
Hj. Sri Junaidah Mas, M.Pd

  
Junaidi, S.Pi  
Pembina Tk I

NIP. 196810221997031004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**

- Jabatan** : Kepala Dinas
- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian pada sektor pertanian dan peternakan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- Fungsi** : 1. Merencanakan pembangunan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah.
2. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab dinas.
4. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanian sektor pada pertanian dan peternakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
7. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
9. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas yang berada pada lingkup dinas.
10. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
11. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
12. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

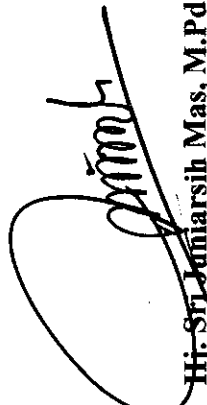


**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (padi Sawah dan Ladang) Produktivitas Jagung Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	Produktivitas : Produksi Tanaman Padi dibagi dengan luas areal panen Padi Produktivitas : Produksi Tanaman Jagung dibagi dengan luas areal panen Jagung Produktivitas : Produksi Tanaman Cabai dibagi dengan luas areal panen Cabai	BPS, Data SP
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi Produksi Telur Ayam Ras	Produksi Daging Sapi di Kabupaten Berau Produksi Telur Ayam Ras di Kabupaten Berau	Laporan rekapitulasi data populasi, pemotongan, pemasakan, produksi dan konsumsi produk peternakan

Bupati Berau,

  
**Hi. Sri Jumiarsih Mas, M.Pd**

Kepala Dinas,

  
**Junaldi, S.R**  
Pembina ITK

NIP. 19681022 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

**Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Junaidi, S.Pt**

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd**

Jabatan : Bupati Berau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd**

Pihak Pertama,  
  
**Junaidi, S.Pt**  
NIP. 19681032 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**DINAS TANAMANA PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pertanian	Produksi	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	3,49 ton/ha
			Produktivitas Jagung	5,95 ton/ha
			Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	4,17 ton/ha
2.	Meningkatnya Peternakan	Produksi	Produksi Daging Sapi	481,87 ton
			Produksi Telur Ayam Ras	2.032,21 ton

**Program (APBD II)**

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 6.238.018.675
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.173.810.212
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.316.197.918
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 3.994.038.500
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 279.824.503
6. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.920.259.511
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.498.085.440

**Jumlah**

**Rp 43.420.234.759**

Tanjung Redeb, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**Ni Sri Junarsih Mas, M.Pd**

Pihak Pertama,  
  
**Junaldi, S.Pt**  
NIP. 19681022 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**

- Jabatan** : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau
- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian pada sektor pertanian dan peternakan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- Fungsi** : 1. Merencanakan pembangunan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah.
2. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
3. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab dinas.
4. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanian sektor pada pertanian dan peternakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
7. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
9. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas yang berada pada lingkup dinas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**  
**DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

10. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
11. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis bagi bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
12. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Produktivitas : Produksi Tanaman Padi dibagi dengan luas areal panen Padi  Produktivitas : Produksi Tanaman Jagung dibagi dengan luas areal panen Jagung  Produktivitas : Produksi Tanaman Cabai dibagi dengan luas areal panen Cabai	BPS dan Data SP
2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi Produksi Telur Ayam Ras	Produksi Daging sapi di Kabupaten Berau Produksi Telur Ayam Ras di Kabupaten Berau	Laporan rekapitulasi data populasi,



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**  
**DAN PETERNAKAN**  
Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
				pemotongan, pemasukan, produksi dan konsumsi produk peternakan

Tanjung Redeb, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

  
H. Sri Jansyah Mas, M.Pd

  
Pihak Pertama,  
Junjidi, S.Pt  
NIP. 1968102 199703 1 004

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
3														
3	27													
3														
3	27													
3	27	01		3.27.01				100	persen			20.179.784.878	100	21.700.500.000
3	27	01	2.01	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi					335.200.000	5	340.000.000
3	27	01	2.01	01	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000	3	100.000.000
3	27	01	2.01	06	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.000.000	2	10.000.000
3	27	01	2.01	07	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			225.200.000	2	230.000.000
								Jumlah Dokumen Statistik Pertanian						
3	27	01	2.02	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.054.582.778	12	18.670.000.000
3	27	01	2.02	01	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17.893.642.778	126	18.500.000.000
3	27	01	2.02	02	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan dan Keuangan yang Dibayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			160.940.000	4	170.000.000
3	27	01	2.05	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000	100	195.000.000
3	27	01	2.05	02	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1	120.000.000
3	27	01	2.05	09	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti BIMTEK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50.000.000	10	75.000.000
3	27	01	2.06	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					375.086.100	12	379.000.000
3	27	01	2.06	01	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik dan Elektronik serta Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			15.000.000	2	15.000.000
3	27	01	2.06	02	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			117.586.100	10	120.000.000
3	27	01	2.06	03	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga/Jumlah Refil tabung gas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4.000.000	10	4.000.000

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
3	27	01	2.06	04	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Konsumsi Rapat, Tamu dan Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15	kali	20	paket	66.500.000		20	68.000.000
3	27	01	2.06	05	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan/Dokumen yang dijilid	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		30	eksemplar	8	paket	15.000.000		8	15.000.000
								Jumlah fotocopy			2500	lembar						
3	27	01	2.06	06	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24	koran	24	dokumen	7.000.000		24	7.000.000
3	27	01	2.06	09	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan ke Dalam Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	kali	12	laporan	150.000.000		12	150.000.000
								Jumlah Perjalanan ke Luar Kabupaten Berau			29	kali						
3	27	01	2.07		3.27.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100</b>	<b>persen</b>			<b>220.020.000</b>		<b>100</b>	<b>800.000.000</b>
3	27	01	2.07	02	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Operasional/ Dinas (Roda 4 dan Roda 2)	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3	unit	1	unit	220.020.000		3	800.000.000
3	27	01	2.08		3.27.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12</b>	<b>bulan</b>			<b>889.896.000</b>		<b>12</b>	<b>1.031.500.000</b>
3	27	01	2.08	01	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Belanja peranko/materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	lembar	1	laporan	1.500.000		1	1.500.000
3	27	01	2.08	02	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan telpon, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	bulan	12	laporan	209.400.000		12	280.000.000
3	27	01	2.08	04	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		20	OB	15	laporan	678.996.000		15	750.000.000
								Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor			20	jenis						
3	27	01	2.09		3.27.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah</b>			<b>100</b>	<b>persen</b>			<b>255.000.000</b>		<b>100</b>	<b>285.000.000</b>
3	27	01	2.09	02	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		60	unit	89	unit	220.000.000		106	250.000.000
3	27	01	2.09	06	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan (sarana kerja) yang diperbaiki	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15	unit	15	unit	10.000.000		15	10.000.000
3	27	01	2.09	09	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	kantor	2	unit	25.000.000		2	25.000.000
3	27	02			3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)</b>			<b>3,37</b>	<b>ton/ha</b>			<b>7.135.488.000</b>		<b>3,49</b>	<b>8.250.000.000</b>
								<b>Produktivitas Jagung</b>			<b>5,85</b>	<b>ton/ha</b>					<b>5,95</b>	
								<b>Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)</b>			<b>4,02</b>	<b>ton/ha</b>					<b>4,17</b>	
								<b>Produksi Daging Sapi</b>			<b>479,47</b>	<b>ton</b>					<b>481,87</b>	

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
				Produksi Telur Ayam Ras				1973,02	ton				2032,21						
3	27	02	2.01	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alsintan						10	unit		3.171.489.200		11	3.500.000.000
3	27	02	2.01	01	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Alsintan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				10	unit	1	laporan	3.171.489.200	1	3.500.000.000
3	27	02	2.02	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terkelolanya SDG Tumbuhan						7917	Ha		3.376.000.000		8322	4.000.000.000
							Terkelolanya SDG Hewan						950	ekor				1000	
3	27	02	2.02	01	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya IB pada Ternak Sapi	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				950	ekor	12	laporan	1.300.000.000	12	1.500.000.000
								Terlaksananya IB pada Ternak Kambing					80	ekor					
3	27	02	2.02	02	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Benih Padi Unggul (UPT. BBPH)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	UPT. BBPH		7	ton	7	dokumen	746.000.000		7	1.000.000.000
								Tersedianya Benih Padi Unggul (Penangkar)		UPT. BBPH		27	ton						
								Perawatan Pohon Duplikat (Duku Rambutan, Durian, Elai)		UPT. BBPH		200	pohon						
3	27	02	2.02	03	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan Padi Sawah	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1600	ha	4	dokumen	1.330.000.000	4	1.500.000.000
								Pengembangan Jagung Hibrida					6250	ha					
								Pengembangan Cabe					50	ha					
								Pengembangan Bawang Merah					17	ha					
3	27	02	2.05	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada peternak						15	peternak dan kelompok		587.998.800		15	750.000.000
3	27	02	2.05	04	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Tersedianya HPT	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	UPT. PT HPT		2,5	ha	28.800	ton	402.998.800		28800	500.000.000
								Tersedianya Bibit Sapi Unggul		UPT. PT HPT		5	ekor						
3	27	02	2.05	05	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				15	kelompok	36	laporan	185.000.000	36	250.000.000
3	27	03		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan						450	ha		975.000.000		550	2.300.000.000
3	27	03	2.01	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B						1	dokumen		70.000.000		1	250.000.000

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
3	27	03	2.01	01	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Inventarisasi data LP2B/KP2B/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	dokumen	1	dokumen	70.000.000		1	250.000.000
3	27	03	2.02		3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		12	unit			905.000.000		13	2.050.000.000
3	27	03	2.02	01	3.27.03.2.02.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	RJIT	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	450	Ha	1	unit	250.000.000		4	900.000.000
3	27	03	2.02	04	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit	1	unit	216.000.000		1	220.000.000
3	27	03	2.02	06	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit	2	unit	175.000.000		4	330.000.000
3	27	03	2.02	09	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Optimasi Lahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	75	Ha	1	unit	264.000.000		3	600.000.000
3	27	04			3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b>		10	persen			1.875.581.536		10,5	2.000.000.000
								<b>Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas</b>		1,3	persen					1,4	
3	27	04	2.01		3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten dan 6 Puskesmas</b>		7590	kali			1.073.830.136		8300	1.100.000.000
								<b>Terlaksananya Vaksinasi Ternak dan HPR</b>		4000	ekor					4000	
3	27	04	2.01	01	3.27.04.2.01.0008	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Permemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Vaksinasi dan Surveyance HPR	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000	ekor	65	laporan	235.000.000		65	250.000.000
								Vaksinasi dan Surveyance Ternak		3000	ekor						
					3.27.04.2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>											
3	27	04	2.01	02	3.27.04.2.03.0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4500	ekor	84	laporan	838.830.136		84	850.000.000
								Pemberdayaan Unit-Unit Pelayanan Kesehatan Hewan:									
								UPT. Puskesmas Batu Putih		UPT. Puskesmas	350	ekor					

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				UPT. Puskesmas Talisayan		UPT. Puskesmas	400	ekor									
				UPT. Puskesmas Biatan		UPT. Puskesmas	500	ekor									
				UPT. Puskesmas Sambaliung		UPT. Puskesmas	580	ekor									
				UPT. Puskesmas Gunung Tabur		UPT. Puskesmas	460	ekor									
				UPT. Puskesmas Segah		UPT. Puskesmas	800	ekor									
3	27	04	2.04	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pelaku usaha		275	sampel			801.751.400	300	900.000.000		
							Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di UPT. RPH		1.402.300	ekor				1.452.400			
3	27	04	2.04	01	3.27.03.2.02.0015	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	UPT. RPH	2300	ekor	1	unit	641.751.400	1	650.000.000
								Jumlah Pemotongan Unggas		UPT. RPH	1.400.000	ekor					
3	27	04	2.04	02	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jaminan Produk Hewan dan Produk Asal Hewan Aman	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		275	sampel	24	laporan	160.000.000	24	250.000.000
3	27	05			3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			4000	Ha			332.898.000	4700	756.000.000
3	27	05	2.01		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			10	Kecamatan			332.898.000	10	756.000.000
3	27	05	2.01	01	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pelayanan Aktif Pengendalian/Penangulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan		48	kali	158	ha	332.898.000	310	756.000.000
3	27	06			3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi			42	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha			319.413.400	44	500.000.000
3	27	06	2.01		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis) usaha pertanian dan peternakan			42	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha			319.413.400	44	500.000.000
3	27	06	2.01	02	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Rekomendasi Kelayakan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin usaha Pertanian		22	Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha	4	dokumen	194.413.400	4	200.000.000

Kode	Penyesuaian Kode berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyesuaian Indikator berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Penyesuaian Target Capaian Kinerja berdasarkan Kepmen DN Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
3	27	06	2.01	03	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Peternak yang Mendapat Fasilitas Modal Usaha	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		20	Orang	15	laporan	125.000.000		20	300.000.000
3	27	07			3.27.07	<b>PROGRAM PPENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PPENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Cakupan bina kelompok petani</b>			87	persen			1.431.540.000		88	1.520.000.000
3	27	07	2.01		3.27.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Penyuluhan Pertanian</b>			10	kecamatan			1.431.540.000		10	1.520.000.000
3	27	07	2.01	01	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Penyuluh	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10	BPP	10	unit	831.540.000		10	700.000.000
3	27	07	2.01	02	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		65	kelompok	66	unit	250.000.000		68	420.000.000
3	27	07	2.01	03	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	UPT, BPPP	20	persen	30	unit	350.000.000		30	400.000.000
															<b>32.249.705.814</b>			<b>37.026.500.000</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. SM. Aminuddin No. 1020, Telp. (0554) 21060, Fax. (0554) 21573

TANJUNG REDEB

KODE POS 77312

Nomor : 700/02/LHE-LKjIP/2024 Tanjung Redeb, 04 Nopember 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi LKjIP Kepada Yth.  
Dinas Tanaman Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Peternakan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten  
Kabupaten Berau Kabupaten Berau  
Berau Tahun 2023 di -

Tanjung Redeb

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi LKjIP tahun 2023 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau Kabupaten Berau, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja,

evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau menunjukkan bahwa nilai sebesar **74,61** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**" yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Perangkat Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,53
b.	Pengukuran Kinerja	30	29,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,46
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	0,94
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>74,61</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*), belum ada diagram *crosscutting*.

- 2) Pengukuran Kinerja  
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan tetapi masih dilaksanakan tiap tahun.
- 3) Pelaporan Kinerja  
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023. Dokumen Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan dipublikasikan. Laporan kinerja hanya menyajikan perbandingan dengan tahun sebelumnya, tetapi belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dan belum ada pedoman pelaksanaan evaluasi sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Membuat *Crosscutting*. Perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- 2) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala tiap bulan / tiap triwulan.
- 3) Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya.
- 4) Membuat Pedoman teknis dan melakukan Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi LKjIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai Upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau beserta jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih



Inspektur,

**Ir. H. Riza Fakhmi**

NIP. 19671001 199803 1 007



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026			
					2021		2022		2023		2024		2025					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan/Dokumen yang dijilid	eksemplar		30	Rp 14.824.200	20	Rp 25.000.000	20	Rp 25.000.000	30	Rp 25.000.000	30	Rp 25.000.000	30	Rp 25.000.000		
		Jumlah fotocopy	lembar		2.500		2.500		2.500		2.500	Rp 1.250.000	2.500	Rp 1.500.000	2500	Rp 1.500.000		
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	koran		24	Rp 7.000.000	24	Rp 7.000.000	24	Rp 7.000.000	24	Rp 7.000.000	24	Rp 7.000.000	24	Rp 7.000.000		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan ke dalam Kabupaten	kali		50	Rp 300.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 250.000.000		
		Jumlah perjalanan ke Luar Kabupaten Berau	kali		29		25		25		29	Rp 100.000.000	29	Rp 100.000.000	30	Rp 100.000.000		
		Musrenbang dan Konsolidasi Program dan Kegiatan Kementan, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan			10													
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		12	Rp 831.379.424	12	Rp 911.500.000	12	Rp 912.500.000	12	Rp 992.500.000	12	Rp 992.500.000	12	Rp 1.001.500.000		
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja peranko/materai	lembar		200	Rp 1.477.000	100	Rp 1.500.000	100	Rp 1.500.000	100	Rp 1.500.000	100	Rp 1.500.000	100	Rp 1.500.000		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, sumber daya air dan listrik	bulan		12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	OB		16	Rp 629.902.424	18	Rp 710.000.000	18	Rp 711.000.000	20	Rp 791.000.000	20	Rp 791.000.000	20	Rp 800.000.000		
		Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor	jenis		60		20		20									
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		100	Rp 233.320.000	100	Rp 245.000.000	100	Rp 250.000.000	100	Rp 255.000.000	100	Rp 275.000.000	100	Rp 275.000.000		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan	unit		87	Rp 198.320.000	60	Rp 200.000.000	60	Rp 200.000.000	60	Rp 200.000.000	60	Rp 200.000.000	60	Rp 200.000.000		
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan (sarana kerja) yang diperbaiki	unit		15	Rp 10.000.000	15	Rp 10.000.000	15	Rp 10.000.000	15	Rp 15.000.000	15	Rp 15.000.000	15	Rp 15.000.000		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	kantor		1	Rp 25.000.000	2	Rp 35.000.000	2	Rp 40.000.000	2	Rp 40.000.000	3	Rp 60.000.000	3	Rp 60.000.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	Ton/Ha	2,96	3,07	Rp 2.789.898.494	3,15	Rp 22.124.500.000	3,26	Rp 9.945.000.000	3,37	Rp 10.920.000.000	3,49	Rp 12.120.000.000	3,62	Rp 13.332.000.000		
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	5,44	5,55		5,65		5,75		5,85		5,95		6,00			
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	Ton/Ha	3,52	3,62		3,77		3,90		4,02		4,17		4,25			

Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Produksi Daging Sapi	Ton	470,178	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		
		Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alsintan	unit		6	Rp 429.999.700	10	Rp 9.855.000.000		10	Rp 1.250.000.000	10	Rp 1.350.000.000	11	Rp 1.450.000.000	11	Rp 1.604.000.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Alsintan	unit		6	Rp 429.999.700	10	Rp 9.855.000.000		10	Rp 1.250.000.000	10	Rp 1.350.000.000	11	Rp 1.450.000.000	11	Rp 1.604.000.000
		Rincian RKA :															
		Tenaga Teknis Alsintan	orang		0		1		0		0		0		0		0
		Mobilisasi Alsin	tahun		1		0		1		1		1		1		1
		Pembinaan Kelompok UPJA	kelompok		3		3		3		3		3		3		3
		Alat Tanam Jagung	unit		0		50		100		100		100		100		100
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDG Tumbuhan	Ha		378	2.049.901.100	6.035	11.389.500.000	7.550	7.800.000.000	7.917	8.500.000.000	8.322	9.400.000.000	8.677	10.358.000.000	
		Terkelolanya SDG Hewan	Ekor		800		850		900		950		1000		1100		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya IB pada Ternak Sapi	ekor		800	Rp 969.999.100	850	Rp 4.060.000.000		900	Rp 1.100.000.000	950	Rp 1.300.000.000	1.000	Rp 1.500.000.000	1.100	Rp 1.854.000.000
		Terlaksananya IB pada Ternak Kambing	ekor		0		50		75		80		90		100		
		Rincian RKA :															
		Tersedianya paket sarana dan prasarana IB	paket		1		1		1		1		1		1		1
		Sosialisasi dan Pembinaan	tahun		1		1		1		1		1		1		1
		Peningkatan jumlah dan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR	orang		2		2		2		2		2		2		2
		Pengadaan Sapi	ekor		0		60										
		Pengadaan Kambing	ekor		70		140										
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Benih Padi Unggul (UPT. BBPH)	ton		20	Rp 649.991.200	5	Rp 900.000.000		6	Rp 1.000.000.000	7	Rp 1.200.000.000	8	Rp 1.400.000.000	9	Rp 1.600.000.000
		Tersedianya Benih Padi Unggul (Penangkar)	ton				20		25		27		29		32		



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Pengadaan Chopper Sawit dan Chopper Rumput	Unit		0		2		2		0		0		0		
		Fasilitasi Sertifikasi dan Pelabelan Pupuk Organik	kelompok		0		0		2		2		2		2		2
		Pengadaan UPPU	unit		1		1		0		0		0		0		0
		Pembinaan dan Penerapan Teknologi Pakan Ternak	kelompok		15		15		15		15		15		15		15
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	Ha	230	265	Rp 799.973.232	300	Rp 7.645.000.000	400	Rp 2.145.000.000	450	Rp 2.393.000.000	550	Rp 2.675.000.000	550	Rp 2.942.500.000	
3.27.03.02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	dokumen		1	Rp 799.973.232	1	Rp 7.645.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 153.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	
		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit		5		4										
3.27.03.02.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Inventarisasi data LP2B/KP2B/LCP2B	dokumen		1	Rp 799.973.232	1	Rp 7.645.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 153.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	
		RJIT	Ha	230	265		300		INDIKATOR PINDAH REKENING KEGIATAN 3.27.03.02.02								
		DAM Parit	Unit	0	1		2										
		Pintu Air	Unit	0	1		2										
		Optimasi Lahan	Ha	0	0		75										
3.27.03.02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	SEBELUMNYA MASUK SUB KEG. 3.27.03.02.01.01				11	Rp 1.995.000.000	12	Rp 2.240.000.000	13	Rp 2.475.000.000	13	Rp 2.742.500.000		
3.27.03.02.02.01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	RJIT	Ha					400	Rp 600.000.000	450	Rp 650.000.000	550	Rp 750.000.000	550	Rp 962.500.000		
3.27.03.02.02.04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM Parit	Unit					3	Rp 300.000.000	3	Rp 400.000.000	3	Rp 450.000.000	3	Rp 485.000.000		
3.27.03.02.02.06	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pintu Air	Unit					3	Rp 475.000.000	3	Rp 550.000.000	3	Rp 615.000.000	3	Rp 615.000.000		
3.27.03.02.02.09	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Optimasi Lahan	Ha					75	Rp 620.000.000	75	Rp 640.000.000	75	Rp 660.000.000	75	Rp 680.000.000		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%					8,5	8,50	Rp 1.443.104.326	9,00	Rp 2.050.000.000	9,50	Rp 2.410.000.000	10,00	Rp 2.620.000.000	10,50
		Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	%	0	0,50		1,00		1,20		1,30		1,40		1,50		



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026		
					2021		2022		2023		2024		2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan																
		Pengadaan Obat Hewan dan Peralatan Veteriner/Kedokteran Hewan	paket		0		2		2		2		2		2		2
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan dengan Pengujian Sampel Obat Hewan	sampel		0		4		5		5		5		5		5
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada pelaku usaha	sampel		180	Rp 199.993.586	200	Rp 800.000.000	250	Rp 950.000.000	275	Rp 1.050.000.000	300	Rp 1.150.000.000	325	Rp 1.225.000.000	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di UPT. RPH	ekor	916.936	1.202.300		1.202.100		1.302.200		1.402.300		1.452.400		1.502.500		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia	ekor	SEBELUMNYA KEG 3.27.04.2.05		Rp 99.993.786	2.100	Rp 600.000.000	2.200	Rp 650.000.000	2.300	700.000.000	2.400	750.000.000	2.500	800.000.000	
		Jumlah Pemotongan Unggas	ekor	914.962	1.200.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.450.000		1.500.000		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jaminan Produk Hewan dan Produk Asal Hewan Aman	sampel	150	180	Rp 99.999.800	200	Rp 200.000.000	250	Rp 300.000.000	275	Rp 350.000.000	300	Rp 400.000.000	325	Rp 425.000.000	
		Rincian RKA :															
		Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban	ekor	1000	1.050		1.100		1.150		1.175		1.200		1.225		
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis di UPT. RPH	ekor	1974	2.300	Rp 217.996.406	PINDAH SUB KEGIATAN 3.27.04.2.04.01										
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia	ekor	1974	2.300	Rp 217.996.406											
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	312	500	Rp 199.999.800	2.535	Rp 2.788.900.000	3.305	Rp 1.998.200.000	4.000	Rp 2.477.500.000	4.700	Rp 2.942.000.000	5.000	Rp 3.236.200.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kecamatan		10	Rp 199.999.800	10	Rp 2.788.900.000	10	Rp 1.998.200.000	10	Rp 2.477.500.000	10	Rp 2.942.000.000	10	Rp 3.236.200.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pelayanan Aktif Pengendalian/ Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kali	24	24	Rp 199.999.800	36	Rp 2.788.900.000	48	Rp 1.998.200.000	48	Rp 2.477.500.000	48	Rp 2.942.000.000	48	Rp 3.236.200.000	



Kode rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2026	
					2021		2022		2023		2024		2025			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
01.00	Dinas Pertanian dan Peternakan															
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Kelembagaan Petani	Kelompok	28	60	Rp 199.993.488	66	Rp 360.000.000	66	Rp 370.000.000	65	400.000.000	65	420.000.000	65	Rp 325.000.000
		Rincian RKA :														
		Pembinaan Kelompok Tani	Kelompok	28	55		60		60		60		60		60	
		Pembinaan Gapoktan	Gapoktan		4		2		2		2		2		2	
		Pembinaan P3A	Kelompok		0		2		2		1		1		1	
		Pembinaan UPJA	Kelompok		0		1		1		1		1		1	
		Pembinaan P4S	Kelompok		1		1		1		1		1		1	
		PENAS XVI	Kali		0		1		0		0		0		0	
		Pra PEDDA	Kali		0		0		1		0		0		0	
		PEDA	Kali		0		0		1		0		0		0	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persen	26%	5%	Rp 396.881.600	10%	Rp 1.270.000.000	22%	950.000.000	30%	1.650.000.000	3%	300.000.000	4%	Rp 675.000.000
		Rincian RKA :														
		Kendaraan Roda 2					10		10		3					
		Kendaraan Roda 4									1					
		Printer			7				1							
		Alat Pengukur PH Tanah					8				35					
		Alat Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)							10							
		Alat Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)							10							
		Alat Ubin							10							
		Infocus									4					
		Wirlees	Unit								4					
		Drone	Unit									4			4	
		GPS	buah								10					
		Takiron	buah								1					
		Cultivator	unit		2								1		4	
		Pembuatan Demplot	Unit	4	4		5		5		5		5		5	
		Penyusunan Program	Kali		0		11		11		11		11		11	
		Jumlah Petani yang Berhasil dalam Produksi Pemasaran	orang	240	175		0		0		0		0		0	
						Rp 22.601.535.964		Rp 56.208.900.000		Rp 39.060.900.000		Rp 41.674.214.000		Rp 43.528.793.280		Rp 46.819.982.944

**Tabel I. Target Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026**

**Tujuan :** Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan

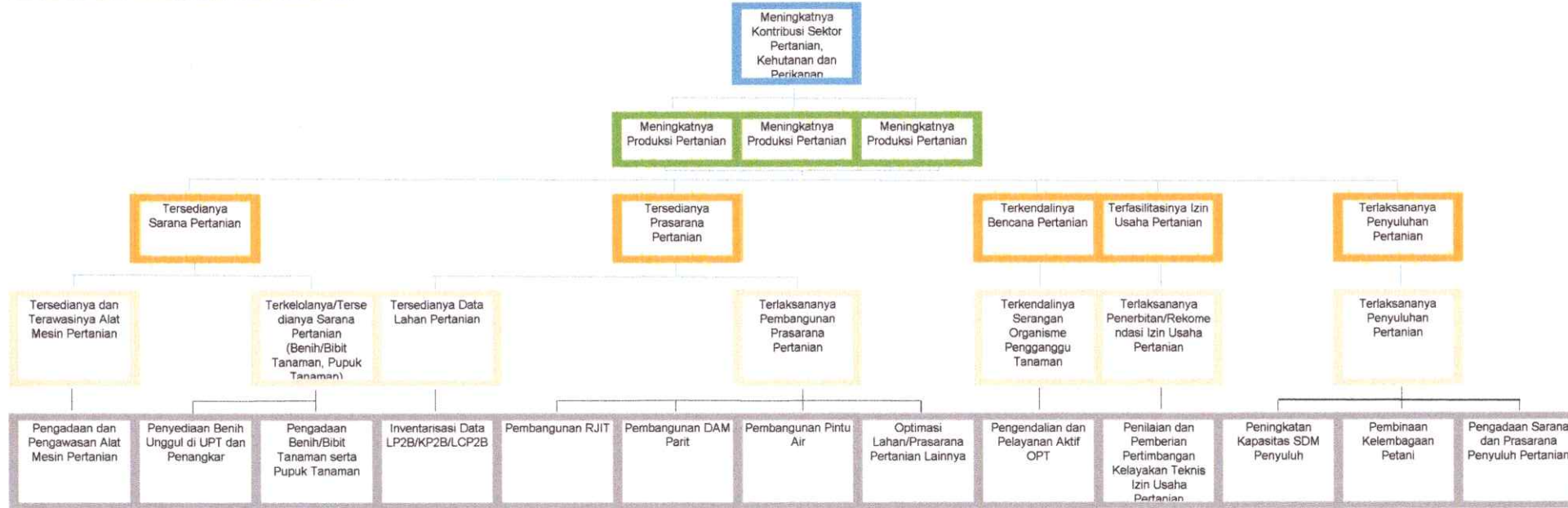
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Ton/ha	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
		Produktivitas Jagung	Ton/ha	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,00
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	Ton/ha	3,62	3,77	3,90	4,02	4,17	4,25
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Ton	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
		Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17

**Tabel 2. Penjabaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021-2026**

- Instansi : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan  
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian pada sektor pertanian dan peternakan  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pejelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)	Produktivitas : Produksi Tanaman Padi dibagi dengan luas areal panen Padi	BPS, Data SP	Bidang Pertanian  Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian
		Produktivitas Jagung	Produktivitas : Produksi Tanaman Jagung dibagi dengan luas areal panen Jagung		
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	Produktivitas : Produksi Tanaman Cabai dibagi dengan luas areal panen Cabai		
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	Produksi Daging Sapi di Kabupaten Berau	Laporan rekapitulasi data populasi, pemotongan, pemasukan, produksi dan konsumsi produk peternakan	Bidang Peternakan  Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Produksi Telur Ayam Ras	Produksi Telur Ayam Ras di Kabupaten Berau		

**CSF**  
**SASARAN 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian**



**PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BRAU TAHUN 2024**

**SASARAN 1 : Meningkatkan Produksi Pertanian**

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
IK : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)

Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Jagung

Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Cabai (Besat, Keriting dan Rawit)

Tersedianya Sarana Pertanian  
IK : Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang); Produktivitas Jagung; Produktivitas Cabai (Besat, Keriting, dan Rawit)

Tersedianya Prasarana Pertanian  
IK : Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan

Terkendalinya Bencana Pertanian  
IK : Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terfasilitasinya Izin Usaha Pertanian  
IK : Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Difasilitasi

Terlaksananya Penyuluhan Pertanian  
IK : Cakupan Bina Kelompok Petani

Tersedianya dan Terawasinya Alat Mesin Pertanian  
IK : Jumlah Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alat mesin Pertanian

Terkelolanya/Tersedianya Benih/Bibit Tanaman  
IK : Terkelolanya SDG Tumbuhan

Tersedianya Data Lahan Pertanian  
IK : Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B

Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian  
IK : Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian (RUJIT, DAM Parit, Pintu Air, Optimasi Lahan dll)

Terkendalinya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman  
IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi Izin Usaha Pertanian  
IK : Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertanian)

Terlaksananya Penyuluhan Pertanian  
IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Penyuluhan Pertanian

Pengadaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian  
IK : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Penyediaan Benih Unggul di UPT dan Penangkar  
IK : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pengadaan Benih/Bibit Tanaman  
IK : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Inventarisasi Data LP2B/KP2B/LCP2B yang Dikelola  
IK : LP2B/KP2B/LCP2B yang Dikelola

Pembangunan RUJIT  
IK : Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi

Pembangunan DAM Parit  
IK : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Pembangunan Pintu Air  
IK : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Optimasi Lahan/Prasarana Pertanian Lainnya  
IK : Jumlah Prasarana Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Pengendalian dan Pelayanan Aktif OPT  
IK : Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan

Penilaian dan Pemberian Pertimbangan Kelayakan Teknis Izin Usaha Pertanian  
IK : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh  
IK : Jumlah Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

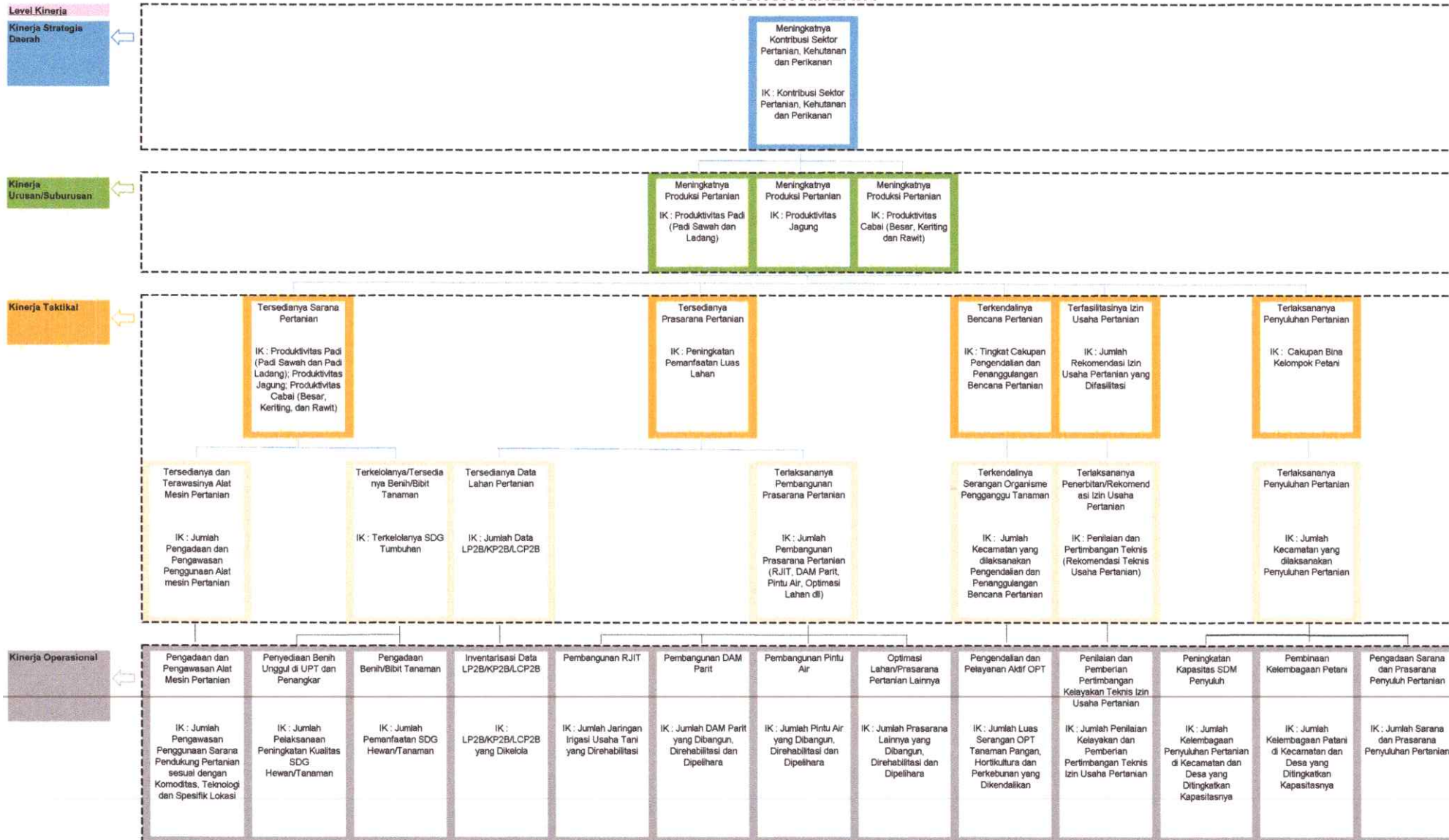
Pembinaan Kelembagaan Petani  
IK : Jumlah Kelembagaan Patani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian  
IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

**SASARAN 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian**

KLASIFIKASI LEVEL KINERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

**POHON KINERJA**



**SASARAN 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian**

**KLASIFIKASI LEVEL KINERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**POHON KINERJA**

Level Kinerja

Kinerja Strategis Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
IK : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
PJ : **BUPATI BERAU**

Kinerja Urusan/Suburusan

Meningkatnya Produksi Pertanian IK : Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang) PJ : Kepala Dinas (Junaldi, S.Pt)	Meningkatnya Produksi Pertanian IK : Produktivitas Jagung PJ : Kepala Dinas (Junaldi, S.Pt)	Meningkatnya Produksi Pertanian IK : Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit) PJ : Kepala Dinas (Junaldi, S.Pt)
---	---	--

Kinerja Taktikal

Tersedianya Sarana Pertanian  
IK : Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang); Produktivitas Jagung; Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)  
PJ : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Suwardi, SP, M.AP)

Tersedianya Prasarana Pertanian  
IK : Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan  
PJ : Kepala Bidang PSKP (Mujito, SE)

Terkendalinya Bencana Pertanian  
IK : Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
PJ : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Suwardi, SP, M.AP)

Terfasilitasinya Izin Usaha Pertanian  
IK : Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Difasilitasi  
PJ : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Suwardi, SP, M.AP)

Terlaksananya Penyuluhan Pertanian  
IK : Cakupan Bina Kelompok Petani  
PJ : Kepala Bidang PSKP (Mujito, SE)

Tersedianya dan Terawasinya Alat Mesin Pertanian	Terkelolanya/Tersedianya Benih/Bibit Tanaman	Tersedianya Data Lahan Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Terkendalinya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
IK : Jumlah Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alat mesin Pertanian	IK : Terkelolanya SDG Tumbuhan	IK : Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	IK : Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian (RJIT, DAM Parit, Pintu Air, Optimasi Lahan dll)	IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	IK : Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Pertanian)	IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Penyuluhan Pertanian
Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : Kepala UPT, BBPH (Adi Mulyo, SP) dan JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda (Wono Nugroho, SP)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Muda (Bambang Sujatmiko, SP)	Pj : JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda (Wono Nugroho, SP)	Pj : JF Penyuluh Pertanian Madya (Supriyanto, S.PKP); JF Penyuluh Pertanian Muda (Rosdianah, SP) dan Kepala Subbag TU UPT, BPPP (Syahriah Noor, SP)

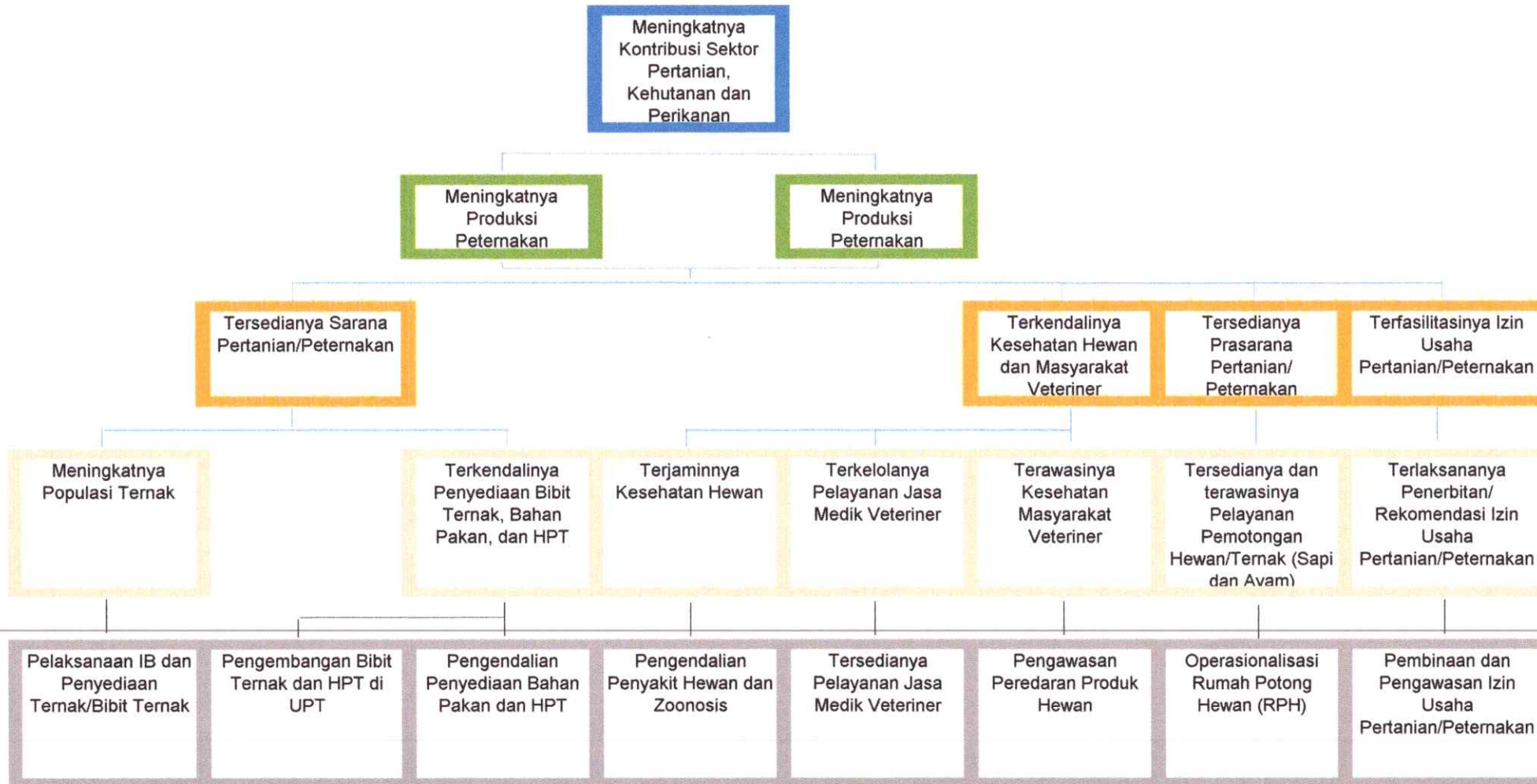
Kinerja Operasional

Pengadaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Penyediaan Benih Unggul di UPT dan Penangkar	Pengadaan Benih/Bibit Tanaman	Inventarisasi Data LP2B/KP2B/LCP2B	Pembangunan RJIT	Pembangunan DAM Parit	Pembangunan Pintu Air	Optimasi Lahan/Prasarana Pertanian Lainnya	Pengendalian dan Pelayanan Aktif OPT	Penilaian dan Pemberian Pertimbangan Kelayakan Teknis Izin Usaha Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	Pembinaan Kelembagaan Petani	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
IK : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	IK : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	IK : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	IK : LP2B/KP2B/LCP2B yang Dikelola	IK : Jumlah Jaringan Irgasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	IK : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Prasarana Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	IK : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	IK : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	IK : Jumlah Kelembagaan Patani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : Kepala UPT, BBPH (Adi Mulyo, SP)	Pj : JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda (Wono Nugroho, SP)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Prasarana dan Sarana Pertanian (Hermansyah, SE)	Pj : JF Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Muda (Bambang Sujatmiko, SP)	Pj : JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda (Wono Nugroho, SP)	Pj : JF Penyuluh Pertanian Madya (Supriyanto, S.PKP)	Pj : JF Penyuluh Pertanian Muda (Rosdianah, SP)	Pj : Kepala Subbag TU UPT, BPPP (Syahriah Noor, SP)

Tanjung Redeb, 5 Februari 2024  
 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
 Kabupaten Berau

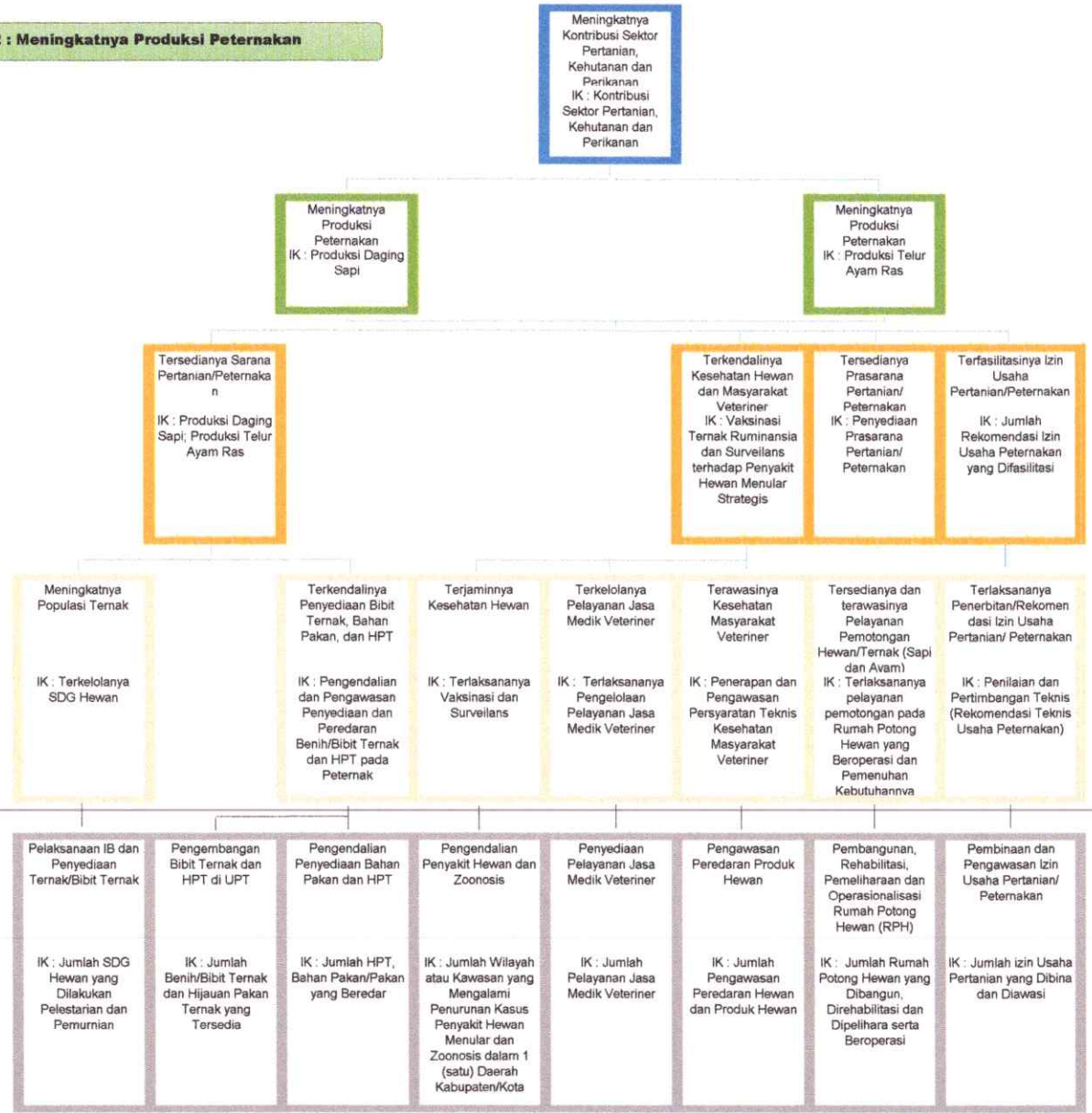
Junaidi, S.Pt  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196810221997031004

**CSF**  
**SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan**

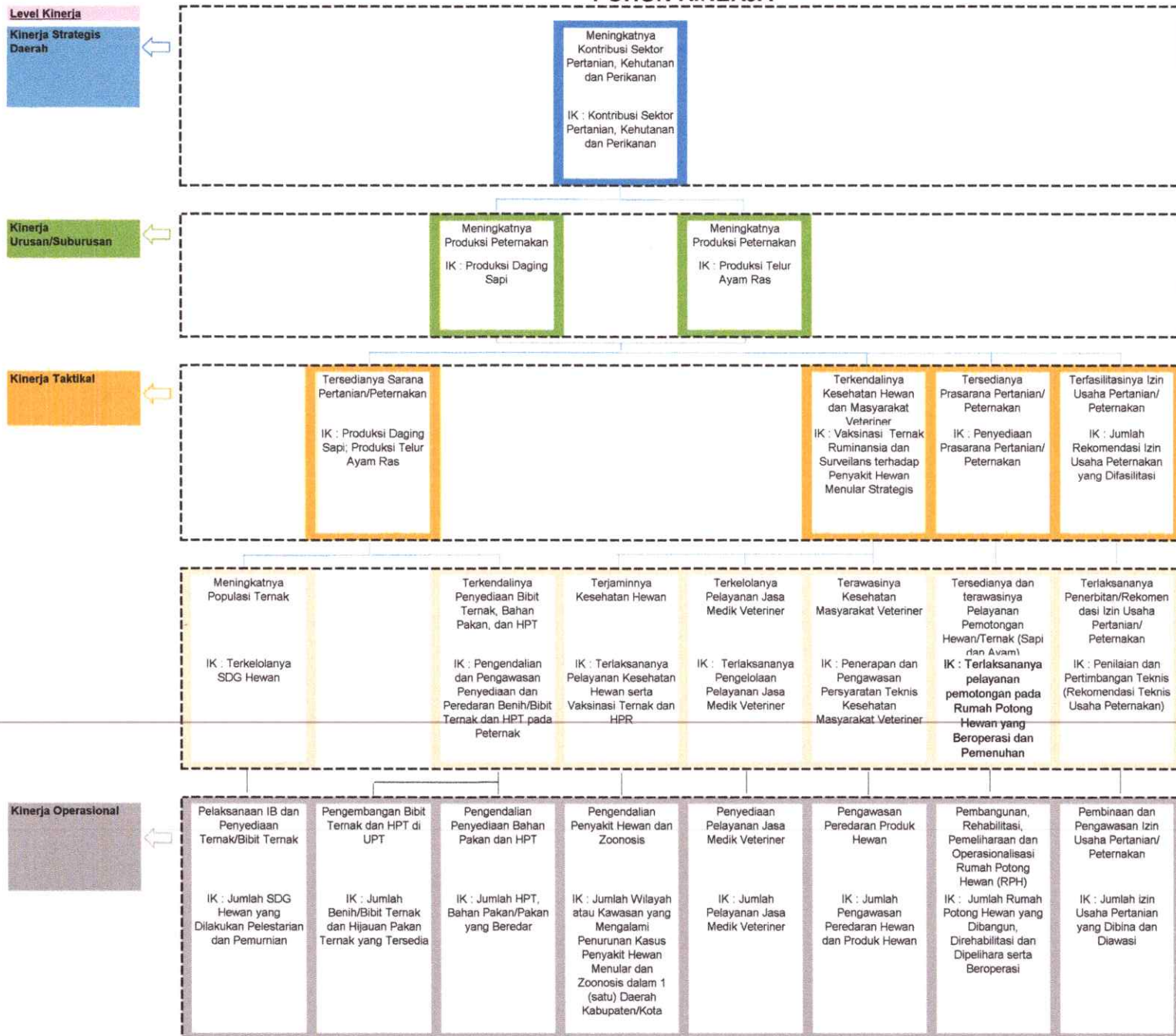


**PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BEAU TAHUN 2023**

**SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan**



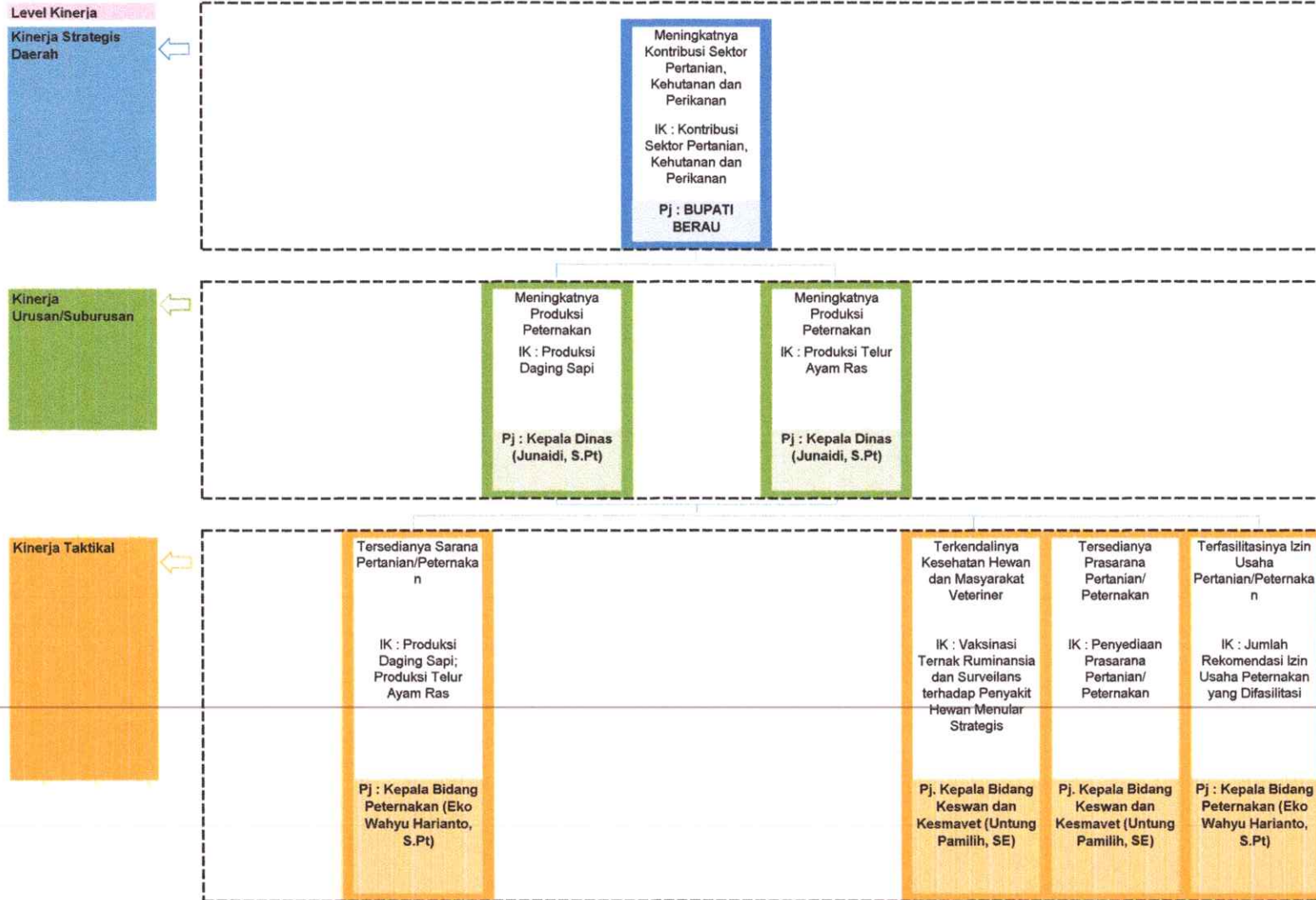
POHON KINERJA



**SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan**

**KLASIFIKASI LEVEL KINERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**POHON KINERJA**



Meningkatnya Populasi Ternak	Terkendalinya Penyediaan Bibit Ternak, Bahan Pakan, dan HPT	Terjaminnya Kesehatan Hewan	Terkelolanya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Teawasinya Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya dan terawasinya Pelayanan Pemotongan Hewan/Ternak (Sapi dan Ayam)	Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi izin Usaha Pertanian/Peternakan
IK : Terkelolanya SDG Hewan	IK : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada Peternak	IK : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan serta Vaksinasi Ternak dan HPR	IK : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	IK : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	IK : Terlaksananya pelayanan pemotongan pada Rumah Potong Hewan yang Beroperasi dan Pemenuhan Kebutuhannya	IK : Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan)
Pj : JF Medik Veteriner Muda (drh. Novi Wijayanti)	Pj : Kepala Subbag TU UPT, Pembibitan Ternak dan Hijauan pakan Ternak (Imron Junaidi, S.Pt) dan JF Pengawas Mutu Pakan Muda (Sri Wardhani, S.Pt)	Pj : JF Medik Veteriner Pertama (drh. Muhammad Rofi' Prasetya)	Pj : JF Medik Veteriner Muda (drh. Iwan Kadianto)	Pj : JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Sri Rahayu, S.Pt)	Pj : Kepala UPT Rumah Potong Hewan (Nanang Ardiansyah, S.Pt, M.Si)	Pj : JF Analls Pasar Hasil Pertanian Muda (Widodo, S.Pt)

Kinerja Operasional

Pelaksanaan IB dan Penyediaan Ternak/Bibit Ternak	Pengembangan Bibit Ternak dan HPT di UPT	Pengendalian Penyediaan Bahan Pakan dan HPT	Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)	Pembinaan dan Pengawasan izin Usaha Pertanian/ Peternakan
IK : Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	IK : Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	IK : Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	IK : Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	IK : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	IK : Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	IK : Jumlah izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi
Pj : JF Medik Veteriner Muda (drh. Novi Wijayanti)	Pj : Kepala Subbag TU UPT, Pembibitan Ternak dan Hijauan pakan Ternak (Imron Junaidi, S.Pt)	Pj : JF Pengawas Mutu Pakan Muda (Sri Wardhani, S.Pt)	Pj : JF Medik Veteriner Pertama (drh. Muhammad Rofi' Prasetya)	Pj : JF Medik Veteriner Muda (drh. Iwan Kadianto)	Pj : JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Sri Rahayu, S.Pt)	Pj : Kepala UPT Rumah Potong Hewan (Nanang Ardiansyah, S.Pt, M.Si)	Pj : JF Analls Pasar Hasil Pertanian Muda (Widodo, S.Pt)

Tanjung Redeb, 5 Februari 2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Berau



**SASARAN 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian**

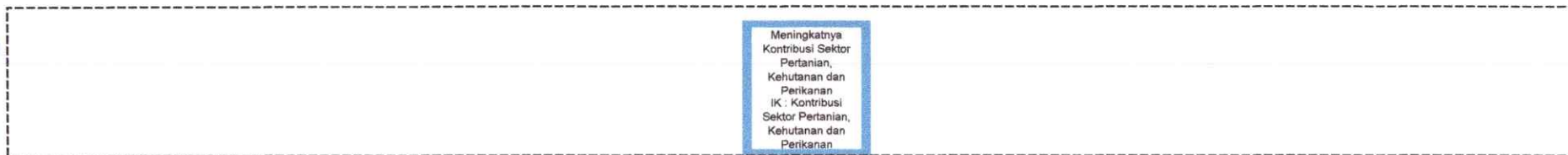
**PENETAPAN KINERJA STRATEGIS DAERAH  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**CASCADING**

Level Kinerja

Kinerja Strategis Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
IK : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

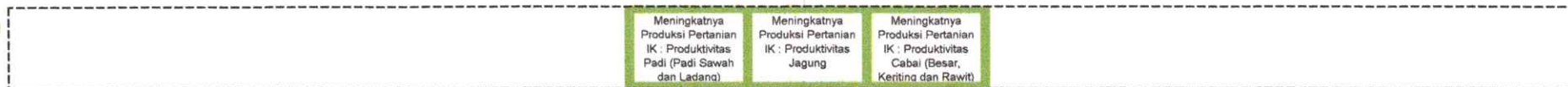


Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,09

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09

Kinerja Urusan/Suburusan

Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Ladang)  
Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Jagung  
Meningkatnya Produksi Pertanian  
IK : Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)



Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target
1 Meningkatnya Produksi Pertanian	1 Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3,62
	2 Produktivitas Jagung	6,00
	3 Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	4,25

Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatnya Produksi Pertanian	1 Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62
	2 Produktivitas Jagung	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6,00
	3 Produktivitas Cabai (Besar, Keriting dan Rawit)	3,62	3,77	3,90	4,02	4,17	4,25

Kinerja Taktikal



1	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Tersedianya Sarana Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	1 Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) 2 Produktivitas Jagung 3 Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)
	<b>Target Program</b>	1 3,37 ton/ha 2 5,85 ton/ha 3 4,02 ton/ha
2	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Tersedianya Prasarana Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan
	<b>Target Program</b>	450 ha
3	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Terkendalinya Bencana Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	<b>Target Program</b>	4.000 ha
4	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Terfasilitasinya Izin Usaha Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Difasilitasi
	<b>Target Program</b>	42 Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha
5	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	Cakupan Bina Kelompok Petani
	<b>Target Program</b>	87 persen

Kinerja Taktikal

Tersedianya dan Terawasinya Alat Mesin Pertanian  IK : Jumlah Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alat mesin Pertanian	Terkelolanya/Tersedianya Benih/Bibit Tanaman  IK : Terkelolanya SDG Tumbuhan	Tersedianya Data Lahan Pertanian  IK : Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian  IK : Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian (RJI, DAM Parit, Pintu Air, Optimasi Lahan dll)	Terkendalinya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi Izin Usaha Pertanian  IK : Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Pertanian)	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian  IK : Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Penyuluhan Pertanian
--	--	--	--	--	--	--

1	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya dan Terawasinya Alat Mesin Pertanian
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pengadaan dan Pengawasan Penggunaan Alat mesin Pertanian
	<b>Target Kegiatan</b>	85 unit
2	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya/Tersedianya SDG Tumbuhan
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pengelolaan SDG Tumbuhan
	<b>Target Kegiatan</b>	640 ha
3	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya Data Lahan Pertanian
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Data LP2B/KP2B/LCP2B
	<b>Target Kegiatan</b>	1 dokumen
4	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya Prasarana Pertanian
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian (RJI, DAM Parit, Pintu Air, Optimasi Lahan dll)
	<b>Target Kegiatan</b>	5 unit, paket
5	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (OPT)
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	<b>Target Kegiatan</b>	10 kecamatan
6	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi Izin Usaha Pertanian
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Pertanian)
	<b>Target Kegiatan</b>	22 Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha
7	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Penyuluhan Pertanian
	<b>Target Kegiatan</b>	10 BPP

Pengadaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Penyediaan Benih Unggul di UPT dan Penangkar	Pengadaan Benih/Bibit Tanaman	Inventarisasi Data LP2B/KP2B/LCP2B yang Dikelola	Pembangunan RJIT	Pembangunan DAM Parit	Pembangunan Pintu Air	Optimasi Lahan/Prasarana Pertanian Lainnya	Pengendalian dan Pelayanan Aktif OPT	Penilaian dan Pemberian Pertimbangan Kelayakan Teknis Izin Usaha Pertanian	Peningkatan Kapasitas SOM Penyuluh	Pembinaan Kelembagaan Petani	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian
IK : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	IK : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	IK : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	IK : LP2B/KP2B/LCP2B yang Dikelola	IK : Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	IK : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Prasarana Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	IK : Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	IK : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	IK : Jumlah Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	IK : Jumlah Kelembagaan Patani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

1	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp3.171.489.200
2	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman di UPT
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	7 dokumen
	<b>Anggaran</b>	Rp746.000.000
3	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	4 dokumen
	<b>Anggaran</b>	Rp1.330.000.000
4	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B/Pembangunan RJIT
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 dokumen
	<b>Anggaran</b>	Rp69.998.000
5	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 dokumen
	<b>Anggaran</b>	Rp249.998.500

6	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 unit
	<b>Anggaran</b>	Rp215.999.500
7	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	2 unit
	<b>Anggaran</b>	Rp174.999.500
8	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 unit
	<b>Anggaran</b>	Rp263.999.700
9	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Dikendalikan
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	158 Ha
	<b>Anggaran</b>	Rp332.898.000
10	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	4 Dokumen
	<b>Anggaran</b>	Rp194.413.400
11	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Bankau)</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	10 unit
	<b>Anggaran</b>	Rp831.540.000
12	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani

Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Target Sub Kegiatan	66 unit
Anggaran	Rp250.000.000

13	Nama Sub Kegiatan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Sasaran Sub Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Target Sub Kegiatan	20 unit
	Anggaran	Rp350.000.000



Tanjung Redeb, 5 Februari 2024  
 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
 Kabupaten Berau

*Junardi, S.Pt*  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196810221997031004

**SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan**

**PENETAPAN KINERJA STRATEGIS DAERAH  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2024**

**CASCADING**

Level Kinerja

Kinerja Strategis Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
IK : Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,09					
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09

Kinerja Urusan/Suburusan

Meningkatnya Produksi Peternakan  
IK : Produksi Daging Sapi

Meningkatnya Produksi Peternakan  
IK : Produksi Telur Ayam Ras

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target					
1 Meningkatnya Produksi Peternakan	1 Produksi Daging Sapi	484,28					
	2 Produksi Telur ayam Ras	2093,17					
Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatnya Produksi Peternakan	1 Produksi Daging Sapi	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28
	2 Produksi Telur ayam Ras	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17

Kinerja Taktikal



1	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Tersedianya Sarana Pertanian/Peternakan
	<b>Indikator Program</b>	1 Produksi Daging Sapi 2 Produksi Telur Ayam Ras
	<b>Target Program</b>	1 479,47 ton 2 1.973,02 ton
2	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
	<b>Indikator Program</b>	1 Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2 Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	<b>Target Program</b>	1 10,00 % 2 1,20 %
3	<b>Nama Program</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>
	<b>Sasaran Program</b>	Terfasilitasinya Izin Usaha Pertanian
	<b>Indikator Program</b>	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Difasilitasi
	<b>Target Program</b>	20 Orang

Meningkatnya Populasi Ternak	Terkendalinya Penyediaan Bibit Ternak, Bahan Pakan, dan HPT	Terjaminnya Kesehatan Hewan	Terkelolanya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terawasinya Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya dan terawasinya Pelayanan Pemotongan Hewan/Ternak (Sapi dan Ayam)	Terlaksananya Penerbitan/Rekomendasi Izin Usaha Pertanian/Peternakan
IK : Terkelolanya SDG Hewan	IK : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada Peternak	IK : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan serta Vaksinasi Ternak dan HPR	IK : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	IK : Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	IK : Terlaksananya pelayanan pemotongan pada Rumah Potong Hewan yang Beroperasi dan Pemenuhan Kehitamaannya	IK : Penilaian dan Pertimbangan Teknis (Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan)

<b>1</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pengelolaan SDG Hewan (IB)
	<b>Target Kegiatan</b>	1030 ekor
<b>2</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terkendalinya Penyediaan Bibit Ternak, Bahan Pakan, dan HPT
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT pada Peternak
	<b>Target Kegiatan</b>	15 kelompok
<b>3</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Vaksinasi Ternak dan HPR
	<b>Target Kegiatan</b>	4000 ekor
<b>4</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	<b>Target Kegiatan</b>	7590 ekor

5	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Pengawasan Produk Hewan dan Produk Asal Hewan
	<b>Target Kegiatan</b>	275 sampel

6	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian/ Peternakan yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten
	<b>Target Kegiatan</b>	20 orang

7	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>
	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Tersedianya dan terawasinya Pelayanan Pemotongan Hewan/Ternak (Sapi dan Ayam)
	<b>Indikator Kegiatan</b>	Terlaksananya pelayanan pemotongan pada Rumah Potong Hewan yang Beroperasi dan Pemenuhan Kebutuhannya
	<b>Target Kegiatan</b>	1.402.300 ekor

<p>Pelaksanaan IB dan Penyediaan Ternak/Bibit Ternak</p> <p>IK : Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian</p>	<p>Pengembangan Bibit Ternak dan HPT di UPT</p> <p>IK : Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia</p>	<p>Pengendalian Penyediaan Bahan Pakan dan HPT</p> <p>IK : Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</p>	<p>Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis</p> <p>IK : Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>IK : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p>	<p>Pengawasan Peredaran Produk Hewan</p> <p>IK : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</p>	<p>Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)</p> <p>IK : Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi</p>	<p>Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian/ Peternakan</p> <p>IK : Jumlah izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi</p>
--	--	---	---	--	---	--	--

1	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	12 Laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp1.229.999.400
2	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	28800 ton
	<b>Anggaran</b>	Rp402.998.800
3	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Benih/bibit Ternak dan HPT yang Tersedia
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	36 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp184.999.900
4	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pemberantasan Penyakit hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kaupaten/Kota
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	65 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp235.000.000

5	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	84 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp838.830.136
6	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	24 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp160.000.000
7	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	15 laporan
	<b>Anggaran</b>	Rp124.999.000
8	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan</b>
	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	Jumlah RPH yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi
	<b>Target Sub Kegiatan</b>	1 unit
	<b>Anggaran</b>	Rp641.751.400

Tanjung Redeb, 5 Februari 2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Berau





**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 010/02/DTPHP.I/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

---

- 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
  11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN**

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

---

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 antara lain:
    1. Rencana Strategis
    2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    3. Rencana Kerja
    4. DPA
    5. Rencana Aksi
    6. Perjanjian Kinerja
    7. Laporan Monev Rencana Aksi
    8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    9. Cascading
    10. Pohon Kinerja
    11. Crosscutting
    12. TL LHE AKIP Internal
    13. SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan  
Kabupaten Berau,



Funaidi S.Pt  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681032 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN

Jalan Bujangga Nomor 01, Kode Pos 77311  
TANJUNG REDEB

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau  
Nomor : 010/02/DTPHP.1/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

Susunan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)  
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Berau

No	Unsur/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Ketua
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet	Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Wakil Ketua 3 Wakil Ketua 4
4	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
5	Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Staf	Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan  
Kabupaten Berau,



**Iunaidi, S.Pt**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681022 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PETERNAKAN  
TANJUNG REDEB**

Alamat : Jalan Bujangga No. 1 Tanjung Redeb Telp. 0554 - 22713

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 010 /32 /DTPP/1 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DINAS  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU

**KESATU :** Menunjuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP pada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP pada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau;
5. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau

- KETIGA** : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau bertugas:
1. Melakukan penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja;
  2. Melakukan penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
  3. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan;
  4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan implemementasi SAKIP
- KEEMPAT** : Tim melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal, 02 JANUARI 2024

Kepala, f



Ruraidi, S.Pt

NIP. 19681022 199703 1 004

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU

Nomor : 010 / 32 / DTPHP / 1 / 2024

Tanggal : 02 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Berau
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda (Hermansyah, S.E)</li><li>2. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda (Sri Wardhani, S.Pt)</li><li>3. Penelaah Teknis Kebijakan (Ika Noor Handayani, SP, M.A.P)</li><li>4. Medik Veteriner Ahli Muda (drh. Iwan Kadianto)</li><li>5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (Henry Budi Utomo, S.IP)</li><li>6. Penelaah Teknis Kebijakan (Sungram)</li><li>7. Pengadministrasi Umum (Sungram)</li></ol>

Kepala, f





**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BERAU**

Nomor SOP : 021/10/DPP.I/I/2023  
Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2023  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Berau  
  
NIP. 19681022 199703 1 004

**Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja**

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. PerMen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. PerMen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan

**Keterkaitan:**

**Peringatan:**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

**Kualifikasi Pelaksana :**












1. Memahami Peraturan perundangan Terkait
2. Memahami RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan
3. Memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
4. Memahami Target Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan








**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Komputer dan Kelengkapan
2. Alat tulis Kantor

**Pencatatan dan Pendataan:**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Ketua Tim Sakip	Wakil Ketua Tim Sakip	Sek. Tim Sakip	Anggota Tim Sakip	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkan Penyusunan Pengukuran Kinerja						Lembar Disposisi	15	Disposisi Pimpinan	
2	Menyiapkan Form Pengumpulan Data dan Informasi Pengukuran Kinerja dari Masing-Masing Bidang, Sekretariat dan UPT (Triwulan)						Form Pengumpulan Data	120	Dokumen Pengumpulan Data	
3	Mendistribusikan Form Pengumpulan Data dan Informasi Pengukuran Kinerja kepada Masing-Masing Bidang, Sekretariat dan UPT (Triwulan)						Form Pengumpulan Data	30	Dokumen Pengumpulan Data	
4	Mengisi Form Pengumpulan Data Capaian Kinerja selanjutnya Menyerahkan yang telah diisi (Triwulan)						Form Pengumpulan Data	180	Dokumen Pengumpulan Data	
5	Menghimpun dan Memvalidasi Data Kinerja Bidang dan UPT Teknis (Triwulan)						Dokumen Pengumpulan Data	180	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Melaksanakan Rapat Pengukuran Kinerja dan Pemberian Arahan/Solusi/Rekomendasi Kadis (Triwulan/ Semester)						Undangan	180	Notulen Rapat	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Ketua Tim Sakip	Wakil Ketua Tim Sakip	Sek. Tim Sakip	Anggota Tim Sakip	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
7	Menyusun Draf Dokumen Pengukuran Kinerja Bidang, Sekretariat dan UPT (Triwulan)						Notulen Rapat	180	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
8	Mengoreksi Draf Dokumen Pengukuran Kinerja (Triwulan)						Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	120	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
9	Menyampaikan Draf Dokumen Pengukuran Kinerja untuk Meminta Persetujuan						Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	120	Dokumen Pengukuran Kinerja	
10	Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja						Dokumen Pengukuran Kinerja	30	Dokumen Pengukuran Kinerja	
11	Pembuatan Surat Pengantar dan Pengiriman Dokumen Pengukuran Kinerja						Dokumen Pengukuran Kinerja	30	Dokumen Pengukuran Kinerja	upload : E-SAKIP BERAU
12	Pengarsipan Dokumen Pengumpulan Data/ Dokumen Pengukuran Kinerja sebagai Bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Akhir Tahun						Arsip	15	Dokumen pengumpulan Data dan Dokumen Pengukuran Kinerja	drive dan hardcopy